

Jurnal

ISSN 977-2722-7227

Widya



Vol. 28 Maret 2023

Mengasah Ilmu, Menambah Wawasan, Menuju Profesional



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626

JURNAL WIDYA

Vol. 28, Maret

ISSN 977-2722-7227

SUSUNAN PENGURUS**Pelindung/ Penasehat**

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Penanggung Jawab

Dr. Drs.H.Mudasir, M.Si,MPd

Editor

Drs.H.M Nasir Nata, SH MH
Dr. Drs.H.Mudasir, M.Si,MPd
Dra. Efrilia, M.Si.
Dra. Ratna Hustati, M.Si
Oktavianus Tampubolon, SH.,MH
Mery Fanada, S.Pd,SKM, M.Kes

Mitra Bastari

Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed
Prof. Dr. Didik Susatyo, M.Si.
Prof. Dr. Indawan, M.Pd
Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si.
Dr. Sri Sulastri, SH.M.Si

Staf/ Sekretariat

Dra.Sugiastuti, SS MM
Ir. Ibrahim Hamid, M.Eng
Holijah, SH, MH
Dra. Srisnawati, M.Si
Drs. Sutralhis, M.Si

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp. (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No. 77 Bukit Besar Telp.0711-440646 Fax 0711-445626

P A L E M B A N G

KATA PENGANTAR

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2014 dan Nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka kreditnya, diantaranya ditegaskan bahwa kegiatan Widyaiswara adalah : “ *Membuat karya tulis ilmiah, Penyusunan Bahan Ajar/ Materi Pendukung Modul*”. Sehubungan dengan hal tsb. maka saya menyambut baik atas diterbitkannya : “***JURNAL WIDYA***”.

Jurnal ini kami sambut dan kami hargai, mengingat di satu sisi akan memperkaya wawasan bagi yang bersangkutan dan juga akan menambah kontribusi pengetahuan bagi peserta Diklat. Oleh karena itu Jurnal Widya tersebut dapat dijadikan bahan bacaan bagi yang memerlukannya terutama yang bersangkutan.

Usaha dan Karya semacam ini kiranya dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan iptek, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan ketajaman pola pikir yang rasional serta profesional.

Demikian, mudah-mudahan Jurnal ini ada manfaatnya.

Palembang, Maret 2023

KEPALA BPSDMD

PROV.SUM.SELATAN

Hj. Tarbiyah, S.Pd., M.M

NIP. 196410131984062001

Pembina Utama Madya /IVD

KATA PENGANTAR

Jurnal Widya merupakan karya tulis ilmiah dari hasil suatu penelitian di sajikan untuk memenuhi atau sebagai kegiatan profesi para widyaiswara di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan widyaiswara Indonesia pada umumnya. Jurnal Widya ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Materi Jurnal ini berisikan uraian-uraian singkat dari hasil pengkajian tentang pelayanan public, Administrasi public, kebijakan public, analisis diklat, dan lain lain, yang telah di susun dan sunting dari berbagai literatur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu harapan saya kiranya dapat diterima sesuai dengan harapan kita bersama.

Kepada para Widyaiswara kami sebagai pengurus jurnal berharap kiranya ada tindak lanjut / berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan ini, minimal tiga bulan sekali dapat diterbitkan. Disamping itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, tim redaksi akan terima dengan segala senang hati.

Palembang, Maret 2023

Redaksi

DAFTAR ISI

Halaman

SISTEM IMFORMASI POTENSI DESA/ KEL. TERINTEGRASI DI PROVINSI SUMSEL. Ibrahim Hamid	1-4
HUBUNGAN ANTAR ANEMIA SELAMA KEHAMILAN DAN KELAHIRN PEMATUR Dewi Sintha	5-13
PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS III PADA PEMBELAJARAN BAHASA INGGIS MELALUI ENGLISH CORNER DI SDN KOTA PRABUULIH Rinny Febriyanti dan Srisnawati	14-23
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PELATIHAN KEPALA SEKOLAH DI BPSDMD SUMTERA SELATAN Farhat Syukri	24-38
KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL TERHADAP TINDAKAN PENYEBARAN INFORMASI PALSU Eva Novaria dan Efrilia	39-45
GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK M. Sutralhis	46-58

SISTEM INFORMASI POTENSI DESA/ KELURAHAN TERINTEGRASI di PROVINSI SUMATERA SELATAN BERBASIS ArcGIS

Ibrahim Hamid

Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

E-mail: ibrahim_plgskynian@yahoo.com, Hp.081227222782

ABSTRAK

Penggunaan peta sebagai informasi dari gambar sebuah wilayah diletakkan dalam bentuk simbol-simbol di dalam kotak legenda. Penyajian yang diberikan oleh peta adalah untuk memberikan informasi-informasi berupa batas wilayah, sarana prasarana, bangunan, penggunaan lahan dan jalan. Wilayah perdesaan dan atau kelurahan dipandang sebagai titik awal pemberdayaan potensi daerah. Dengan adanya pemetaan potensi desa/kelurahan ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi tentang potensi-potensi yang terdapat di wilayah terkecil dari sebuah provinsi, serta dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan desa/kelurahan. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan data statistik, hasil pemetaan, citra satelit, dan hasil survey lapangan di wilayah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan software ArcGIS.

Kata Kunci : ArcGIS, pemetaan, potensi desa/ kelurahan

A. PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Geodatabase data batas wilayah administrasi desa/kelurahan edisi tahun 2022 merupakan pemutakhiran dari Geodatabase data batas wilayah administrasi desa/kelurahan edisi bulan Mei tahun 2021. Proses pemutakhiran yang dilakukan antara lain: (1) Pemuktahiran data batas administrasi desa/kelurahan hasil Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021; (2) Penyelarasan batas desa/kelurahan pada batas kabupaten/kota; (3) Penyelarasan area saling klaim dan tidak terdefinisi dengan metode thiessen polygon, dan dibagi berdasarkan prinsip sama jarak lalu digabungkan dengan desa/kelurahan di sekitarnya; (4) Sinkronisasi data wilayah administrasi desa/kelurahan berdasarkan Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021; (5) Pemutakhiran garis pantai menggunakan data garis pantai dari PPKLP tahun 2022. Sumber data pada geodatabase ini antara lain data batas desa/kelurahan hasil kegiatan Ajudikasi Batas Desa tahun 2013 - 2015, Delineasi Batas Wilayah Administrasi desa secara kartometrik tahun 2016 - 2017, Delineasi batas wilayah administrasi desa secara

kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2018 - 2019, sinkronisasi data batas desa hasil penetapan Pemerintah Daerah mengacu pada standar nasional Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) tahun 2019, Kesepakatan Teknis batas wilayah administrasi desa tahun 2020, Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Tahun 2021, Delineasi batas wilayah administrasi desa melalui kegiatan perjanjian Kerja Sama antara BIG dengan Pemerintah Daerah baik melalui PKS maupun PNPB, data batas wilayah administrasi desa/kelurahan dari Pemerintah Daerah, dan data batas wilayah administrasi desa dari Peta Rupa Bumi Indonesia. Geodatabase ini dibuat menggunakan Garis Pantai Edisi Tahun 2022. Beberapa catatan tambahan dalam Geodatabase data batas wilayah administrasi desa/kelurahan edisi tahun 2022 ini diantaranya adalah : (1) Masih terdapat area tidak terdefinisi untuk wilayah pulau dan danau; (2) Masih terdapat beberapa desa/kelurahan yang tidak ada dalam data spasial karena merupakan hasil pemekaran, rekap daftar desa yang belum ada dalam database ini terlampir dalam tabel rekapitulasi indeks desa berdasarkan Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021; (3) Masih terdapat kondisi desa

yang memiliki perbedaan cakupan wilayah administrasi Kecamatan antara data spasial dengan Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 di wilayah Papua; (4) Terdapat beberapa wilayah desa yang belum dapat disesuaikan ke batas kabupaten/kota; (5) Terdapat wilayah desa terapung yang tidak tergambarkan pada data garis pantai namun terdefinisi dalam kode dan data wilayah administrasi.

Desa Inovasi adalah desa yang warga masyarakatnya mampu mengenali dan mengatasi serta memanfaatkan teknologi canggih atau cara-cara baru untuk mengatasi masalah dan meningkatkan perekonomiannya dengan cara menggunakan teknologi yang ada di sekitar lingkungannya secara mandiri.

Berdasarkan data dari BPS, jumlah Desa/ Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 2020 adalah sebanyak 3.289 Desa/ Kelurahan, dengan jumlah Desa/ Kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Lahat sebanyak 377 Desa/ Kelurahan. Hal ini dapat terlihat pada peta persebaran Desa/ Kelurahan di Kabupaten/ Kota Tahun 2020 se-Sumatera Selatan.

Gambar 1.1.

Peta Persebaran Desa/ Kelurahan di Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2020



2. Tujuan

Tujuan umum yang ingin dicapai tulisan ini adalah terwujudnya pembangunan Sistem Informasi Potensi Desa/ Kelurahan Terintegrasi untuk inovasi dalam menunjang program pemerintah membangun Desa/ Kelurahan inovasi di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Ruang Lingkup

Batasan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah peta dasar wilayah perdesaan, kelurahan, data potensi sumber daya alam dan data potensi sumber daya manusia di wilayah perdesaan dan kelurahan

4. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka yang dinarasikan penulis dari hasil penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang didapat dari sebuah penelitian dilapangan dengan standar yang dianjurkan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2014).

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan materi-materi berupa: peta tematik wilayah perdesaan dan kelurahan, data potensi perdesaan dan kelurahan. Selanjutnya data tersebut dimasukkan sebagai bahan penelitian.

5. Landasan Teori

Menurut R. Bintarto (Dalam Fairus Adira, 2020) Desa ialah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat

Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat.

a. Landasan Pembangunan Pedesaan Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai berikut:

1. Sebuah modul kota dasar (basic urban module) yang terdiri dari distrik-distrik otonom, yang dibangun pada kawasan desa berkepadatan tinggi atau kawasan peri urban, dengan populasi sebesar 10.000-15.000 jiwa yang tersebar di area seluas 10-15 km².
2. Setiap wilayah memiliki pusat pelayanan yang dapat diakses dengan mudah dari segala penjuru di wilayah tersebut, baik dengan kaki maupun sepeda, selama 20 menit atau kurang.
3. Setiap pusat pelayanan memiliki komplemen pelayanan dan fasilitas publik terstandarisasi.
4. Dipilih satu wilayah pusat (area desa- kota yang telah mengalami transformasi spasial paling besar) untuk dibangun sebagai pusat pengolahan potensi perdesaan terkait.
5. Lokasi dan system transportasi di wilayah terkait dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk mengglaju (commuting).
6. Wilayah dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas atau bahan mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai kebutuhan. Selanjutnya wilayah didorong untuk membentuk satuan usaha yang optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan menengah.

B. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini system informasi data Desa/ Kelurahan didapat dengan beberapa langkah sadalah sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan
2. Koordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait Sistem Informasi Potensi Desa/ Kelurahan Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mengumpulkan referensi Sistem Informasi Potensi Desa/ Kelurahan

Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Membuat desain format-format Sistem Informasi Potensi Desa/ Kelurahan Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan. Uji coba desain Sistem Informasi Potensi Desa/ Kelurahan Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Input data pada Sistem Informasi Potensi Desa/ Kelurahan Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Terwujudnya Sistem Informasi Potensi Desa/ Kelurahan Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan dengan data 2 (dua) Desa/ Kelurahan di Kota Palembang.
7. Selanjutnya dari data dilakukan perbaikan, penyempurnaan pengelolaan, dan penambahan data Sistem Informasi Potensi Desa/ Kelurahan Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan

KESIMPULAN

1. Untuk membuat system informasi potensi Desa/ Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sumber data yang benar dan akurat yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain sumber peta dari Badan Informasi Geospasial. Selajutnya dilakukan digitasi sesuai dengan tema yang diinginkan.
2. Untuk membuat peta potensi Desa/ Kelurahan diperlukan data statistic berupa data sumber daya alam, demografi dan data pendukung lainnya sesuai dengan tema peta yang diinginkan.

Daftar Pustaka

- Bintoro, Tjokroamidjojo. (2000). Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. Jakarta : Rajawali
- Fairus, Adira. (2020). Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa. Jogjakarta: Pixelindo.
- Sugiyono. 2014. Tata cara Riset Kuantitatif Kualitatif serta R&D. Bandung CV Alfabeta

Daftar Referensi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Desa

Permendagri No 84 Thn 2015 Tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOT)
Pemerintahan Desa

Permendes Republik Indonesia No 19 Tahun
2017

JURNAL

DEWI SINTHA.SST.M.Kes WIDYAIWARA UPTD BAPELKES PROV SUMSEL

1. JUDUL

Relationship Between Anaemia During Pregnancy and Preterm Delivery (Hubungan Antara Anemia Selama Kehamilan dan Kelahiran Prematur)

2. ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kelahiran prematur dan anemia ibu. Studi kohort retrospektif ini selesai dengan 483 wanita; 294 di antaranya kelahiran normal dan 189 kelahiran prematur. Kadar hemoglobin (Hb) dari semua wanita yang berpartisipasi dalam penelitian ini diukur pada trimester pertama dan kedua, dan dihitung kadar rata-rata Hb. Para wanita hamil yang berpartisipasi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok, menurut kadar Hb mereka: kadar Hb <10 g/dl, kadar Hb antara 10 dan 11 g/dl dan kadar Hb >11g/dl. Dalam analisis kasar, wanita dengan kadar Hb rendah memiliki peningkatan angka kelahiran prematur (rasio odds, 2,42; 95% CI, 1,07-5,49). Studi kami menyediakan data bahwa kadar Hb rendah efektif pada kelahiran prematur.

3. PERNYATAAN DAMPAK

Apa yang sudah diketahui tentang masalah ini? Kadar serum Hb memiliki hubungan yang tidak konsisten dengan risiko kelahiran prematur.

Apa yang ditambahkan pada hasil penelitian ini? Dibandingkan dengan kelahiran matur, kadar Hb lebih rendah pada kelahiran prematur. Penting untuk memperhitungkan kadar Hb pada trimester pertama dan kedua kehamilan saat menggambarkan anemia kehamilan.

Apa implikasi dari temuan ini untuk praktik klinis dan/atau penelitian lebih lanjut?

Mengingat hasil ini, dokter harus memperhitungkan anemia dalam kehamilan saat mempertimbangkan risiko kelahiran prematur.

4. PENDAHULUAN

Kelahiran prematur, yang merupakan penyebab paling umum dari kematian neonatus dan penyebab kematian paling umum kedua pada anak usia <5 tahun, didefinisikan sebagai kelahiran sebelum 37 minggu kehamilan (Blencowe et al. [2012](#); Shapiro-Mendoza et al. [2016](#)). Tingkat kelahiran prematur di seluruh dunia berkisar dari 5% hingga 18%, dan angka ini secara bertahap meningkat baru-baru ini (Arias et al. [2003](#); Howson et al. [2013](#)). Itu bisa memberi kesan bahwa bertambahnya usia ibu, semakin sering menggunakan teknik reproduksi berbantuan dan peningkatan kehamilan ganda berkontribusi untuk kelahiran prematur (Starrs et al. [2014](#)).

Menurut kriteria WHO, anemia selama kehamilan didefinisikan sebagai yang memiliki Hb <11 g/dl selama

kehamilan (WHO [2011](#)). Lebih dari 40% wanita hamil di seluruh dunia menderita anemia (WHO [2012](#)). Kegagalan untuk mengurangi angka anemia selama kehamilan di seluruh dunia telah mengakibatkan munculnya populasi dan negara dengan penurunan produktivitas dan keterlambatan perkembangan, karena anemia merusak kualitas hidup dan status kesehatan jutaan wanita yang menghasilkan generasi keterlambatan perkembangan dan kesulitan belajar (WHO [2016](#)).

Studi tentang hubungan antara kadar Hb ibu dan kelahiran prematur telah didapatkan hasil yang konsisten. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara kadar Hb rendah dan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR) (Scanlon et al. [2000](#); Levy et al. [2005](#)), sedangkan penelitian lain telah gagal menunjukkan hubungan seperti itu (Harding et al. [1997](#); Xiong et al. [2003](#)). Alasan untuk perbedaan ini mungkin pengukuran Hb dilakukan selama trimester berbeda. Beberapa penelitian telah mengukur kadar Hb (Zhou et al. [1998](#); Levy et al. [2005](#)) pada trimester pertama, sedangkan penelitian lain (Chang et al. [2003](#)) mengukur kadar Hb pada trimester kedua dan trimester ketiga. Alasan lain untuk ketidakkonsistenan ini mungkin bahwa studi belum mempertimbangkan faktor perancu seperti usia ibu, gravida dan cara lahir.

Dalam penelitian ini, kami mengevaluasi hubungan antara kelahiran prematur dan kadar Hb rata-rata wanita hamil yang mendatangi setidaknya tiga kunjungan tindak lanjut kehamilan di pusat kesehatan keluarga yang mana kadar Hb diukur pada trimester pertama dan kedua kehamilan. Tujuan kami dalam penelitian ini, yang merupakan studi pertama yang mengevaluasi hubungan antara kadar Hb dan kelahiran prematur di Turki, untuk menguji hubungan antara kelahiran prematur dan anemia ibu.

5. METODE

Sumber data

Studi kohort retrospektif ini dikumpulkan dari delapan pusat kesehatan keluarga dari Kota duri dan Kota Dumai . Lima ratus tujuh puluh empat pasien yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari orang yang memiliki catatan dan kehamilan mereka terdeteksi antara 1 Januari 2017 dan 1 Desember 2017 di pusat kesehatan keluarga ini. Dan tindak lanjut mereka juga dilakukan di pusat kesehatan keluarga ini. Data dikumpulkan antara 1 Desember 2017 dan 1 Maret 2018. Setelah kriteria eksklusi, penelitian diselesaikan dengan 483 pasien; 294 di antaranya memiliki persalinan normal dan 189 memiliki kelahiran prematur. Semua ibu yang berpartisipasi dalam penelitian ini telah menghadiri setidaknya tiga kunjungan tindak lanjut kehamilan dengan dokter keluarga

mereka (setidaknya satu kunjungan di setiap trimester) sesuai dengan protokol tindak lanjut kehamilan yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Nilai Hb dari semua wanita yang berpartisipasi dalam penelitian ini diukur pada trimester pertama dan kedua, dan rata-rata nilai Hb telah dihitung.

Para wanita yang tidak secara teratur menghadiri kunjungan tindak lanjut untuk alasan apa pun, mereka dengan nilai Hb yang hilang di salah satu kunjungan tindak lanjut, mereka dengan kehamilan ganda dan mereka yang didiagnosis dengan penyakit kronis, plasenta previa, atau ablasio plasenta dikeluarkan dari penelitian.

Hasil kelahiran dan variabel ibu

Kelahiran prematur didefinisikan sebagai kelahiran sebelum 37 minggu kehamilan. Minggu kehamilan dihitung menurut periode menstruasi terakhir atau hasil USG pada trimester pertama. Pengukuran kadar Hb di trimester pertama dan kedua dan perhitungan nilai rata-rata telah mendukung diagnosis anemia. Anemia didefinisikan memiliki kadar Hb <11 mg/dl. Selanjutnya, wanita yang mengalami anemia selama kehamilan dibagi menjadi dua kelompok: mereka dengan kadar Hb <10 mg/dl dan mereka dengan kadar Hb antara 10 dan 11 mg/dl. Cara persalinan untuk pasien dicatat sebagai operasi caesar atau persalinan pervaginam. Kelompok kontrol ($N=294$) dipilih secara acak dari

kelahiran hidup tunggal yang terjadi pada ≥ 37 minggu selesai kehamilan.

Analisis statistik

Karakteristik anak dan orang tua diukur dengan menggunakan *chi-square test* untuk karakteristik kategori dan *t test* untuk karakteristik yang berkelanjutan terkait anemia. Variabel kategori disajikan sebagai frekuensi dengan persentase, sedangkan variabel kontinyu digambarkan sebagai mean $\pm$ standar deviasi.

Kami menggunakan regresi logistik univariat dan multivariat untuk memperkirakan rasio odds kasar dan yang disesuaikan (OR) dan interval kepercayaan 95% (CI). Model multivariabel telah disesuaikan untuk: model 1 (usia ibu, penambahan berat badan selama kehamilan, tingkat pendidikan ibu, jenis kelamin bayi, dan pendapatan bulanan, jumlah tindak lanjut kehamilan) untuk mengevaluasi hubungan antara anemia dan kelahiran prematur. Nilai *p* kurang dari 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Paket perangkat lunak statistik SPSS 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) digunakan untuk analisis data.

6. HASIL

Pada pemeriksaan karakteristik sosiodemografi ditemukan bahwa 57,7% bayi prematur adalah laki-laki ($n = 109$) dan 42,3% di antaranya adalah perempuan ($n=80$). Cara persalinan operasi sesar dalam 75,7% ($n = 143$) dari ibu dengan persalinan prematur dan

persalinan pervaginam 51% ($n = 150$) dari ibu yang melahirkan bayi cukup bulan; perbedaan antar kelompok adalah signifikan secara statistik ($p < 0,001$). Menurut data 2016 dari The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Turki menempati urutan pertama dalam persalinan sesar di dunia dengan angka 54,1% (Organisasi OECD 2016). Situasi ini menyebabkan tingginya angka kelahiran sesar di kedua kelompok. Dari para wanita yang melahirkan bayi prematur, 51,3% ($n = 97$) telah hadir tiga atau lebih kunjungan tindak lanjut kehamilan selama kehamilan, sedangkan tiga atau lebih kunjungan tindak lanjut adalah 1,7% ($n = 5$) pada wanita yang melahirkan bayi cukup bulan ($p < 0,001$). Menurut protokol tindak lanjut kehamilan Departemen Kesehatan, wanita hamil yang mengalami anemia dikategorikan memiliki kehamilan berisiko tinggi (berisiko), dan tindak lanjut dengan interval yang lebih sering direkomendasikan oleh protokol tersebut. Situasi ini dapat menjelaskan perbedaan tindak lanjut antara dua kelompok. Status sosial ekonomi, status pendidikan ibu, status pekerjaan ibu dan jumlah kehamilan disajikan pada [Tabel 1](#).

Table 1. Perinatal and infant characteristics by delivery time.

	Term delivery (n= 294)		Preterm delivery (n= 189)		p Value
	N	%	N	%	
Delivery mode					
Vaginal delivery	144	49	46	24.3	<.001
Caesarean section	150	51	143	75.7	
Monthly income					
>2000\$	125	42.5	94	49.7	.008
>1000 to ≤2000\$	121	41.2	82	43.4	
≤1000\$	48	16.3	13	6.9	
Pregnancy visits					
≤3	289	98.3	92	48.7	<.001
>3	5	1.7	97	51.3	
Number of pregnancies					
1	112	38.1	61	32.3	.313
2	85	28.9	54	28.6	
>3	97	33.0	74	39.2	
Mother's working status					
Yes	73	24.8	42	22.2	.511
No	221	75.2	147	77.8	
Baby's gender					
Boys	162	55.1	109	57.7	.579
Girls	132	44.9	80	42.3	
Mother's education status					
Primary education	164	59.8	98	51.8	.521
High school	83	28.2	50	26.5	
University	47	16	41	21.7	

OR pada yang mengalami anemia pada kehamilan dengan suatu hubungan persalinan prematur diperkirakan menggunakan regresi logistik. Untuk mengevaluasi hubungan antara kadar Hb dan risiko hasil kehamilan yang merugikan, OR untuk masing-masing kelompok Hb ke kelompok referensi diperkirakan dengan CI 95%. Kadar Hb rata-rata selama kehamilan adalah $10,89 \pm 0,85$ mg/dl di wanita yang melahirkan bayi prematur; 68,8% ($n = 130$) dari para wanita yang menderita anemia. Kadar Hb rata-rata selama kehamilan adalah $11,66 \pm 0,85$ mg/dl pada wanita kontrol yang melahirkan bayi cukup bulan; dan 23,81% ($n = 70$) wanita ini menderita anemia. Ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok ($p < 0.001$). Usia rata-rata ibu yang melahirkan bayi prematur berusia $30,56 \pm 5,84$ tahun,

dan ini lebih rendah dibanding kelompok kontrol ($32,23 \pm 5,89$) ($p < 0,05$) (Tabel 2).

Table 2. Maternal age, Hb levels and birth weights in delivery time.

	Term delivery (n = 294)	Preterm delivery (n = 189)	
Maternal age (years)	32.23 ± 5.89	30.56 ± 5.84	.003
Maternal Hb levels (g/dl)	11.66 ± 0.85	10.89 ± 0.85	.001
Birth weight (g)	3359 ± 482.58	2655 ± 657.22	.001

Anemia saat kehamilan didefinisikan memiliki Hb kurang dari 11 g/dl menurut WHO. Menurut definisi ini, wanita hamil dibagi sebagai non-anemia dan anemia. Untuk menunjukkan hubungan antara tingkat keparahan level anemia dan kelahiran prematur, pasien yang memiliki Hb kurang dari 10 g/dl dievaluasi sebagai kelompok ketiga. Dalam analisis kasar, wanita dengan kadar Hb rendah ($Hb < 10$ g/dl) memiliki peningkatan angka kelahiran prematur (OR, 2,42; 95% CI, 1,07-5,49). Meskipun faktor-faktor perancu seperti usia, tingkat pendidikan ibu, jenis kelamin bayi dan panjang kehamilan ibu ditambahkan ke analisis, anemia terus berdampak pada kelahiran prematur (d disesuaikan OR, 2,06; 95% CI, 1,98-4,30) (Tabel 3).

Table 3. Crude and adjusted prevalence ratios of preterm delivery for Hb levels.

Hb levels	Preterm delivery			
	OR	95% CI	AOR	95% CI
Hb < 10 g/dl	2.42	[1.07–5.49]	2.06	[1.98–4.30]
Hb ≥ 10 g/dl, < 11 g/dl	1.77	[0.86–3.64]	1.63	[0.93–4.18]
Hb ≥ 11 g/dl	1 [Reference]		1 [Reference]	

CI: confidence interval; OR: odds ratio; AOR: adjusted odds ratio; Hb: haemoglobin;
AOR: odds ratios adjusted for age of the mother, mothers weight gain at the gestation, gender of the baby, income level and numbers of follow-up at the gestation.

7. DISKUSI

Persalinan prematur sekarang dianggap sebagai sindrom yang diprakarsai oleh

berbagai mekanisme, termasuk infeksi atau peradangan, iskemia uteroplasenta atau perdarahan, peregangan uterus berlebihan, stres, dan proses lain yang dimediasi secara imunologis (Romero et al. 2006). Seperti yang ditunjukkan dalam banyak penelitian, anemia ibu dipertimbangkan sebagai faktor risiko untuk hasil kehamilan yang buruk, dan itu mengancam kehidupan janin (Ivan dan Mangaiarkkarasi, 2013). Di sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2017, sebagian besar komplikasi janin dan ibu diamati pada wanita anemia. Delapan puluh persen dari peserta yang melakukan aborsi, 40% dari yang terhambat persalinan, 86% dari perdarahan postpartum (PPH), 71,4% dari preeclampsia, dan semua wanita dengan persalinan lama adalah anemia. Sekitar 25% wanita melahirkan bayi lahir rendah, 57% bayi BBLR, 69% melakukan aborsi / lahir mati, dan semuanya bayi baru lahir dengan asfiksia lahir terjadi pada ibu yang anemia (Suryanarayana et al. 2017).

Hasil terpenting dari penelitian kami adalah anemia selama kehamilan itu terkait dengan kelahiran prematur. Sebuah studi yang dilakukan di Israel menunjukkan peningkatan risiko persalinan prematur dengan meningkatnya keparahan anemia (Levy et al. 2005). Studi lain yang dilakukan di Nepal menemukan hubungan kirim antara anemia selama kehami

lan dan kelahiran prematur (Bondevik et al. [2001](#)).

Salah satu kekuatan dari penelitian kami adalah bahwa kunjungan tindak lanjut kehamilan dilakukan oleh dokter keluarga yang sama setidaknya sekali dalam setiap trimester. Pengukuran kadar Hb dalam trimester pertama dan kedua dan perhitungan kadar Hb rata-rata telah mendukung diagnosis anemia. Nilai Hb dalam penelitian sebelumnya telah diukur paling mungkin di trimester kedua akhir atau trimester ketiga karena nilai Hb pada wanita hamil menurun dalam perjalanan kehamilan dan mencapai nilai terendah kira-kira selama 34-36 minggu kehamilan (Hytten [1985](#)). Studi kami tidak memasukan nilai Hb yang diukur pada trimester ketiga karena anemia dilusional, yang terjadi peningkatan 40-50% volume plasma selama periode ini, tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah darah merah sel setelah 32 minggu kehamilan (Faupel-Badger et al. [2007](#)).

Karakteristik lain yang membuat studi kami berharga adalah bahwa faktor-faktor perancu dipertimbangkan dalam analisis statistik. Dalam penelitian kami, faktor perancu seperti usia, jumlah kehamilan, status merokok ibu dan jenis kelamin bayi digunakan dalam analisis regresi logistik, dan dampak anemia pada kelahiran prematur

ditampilkan lebih jelas. Dalam analisis kasar, kami mengungkapkan dampak anemia pada kelahiran prematur (OR untuk Hb <10 mg/dl, 2.42; 95% CI: 1,07-5,49 dan OR untuk Hb $\geq$ 10 mg/dl dan <11 mg/dl, 1,77; 95% CI: 1.98-4.30). Besarnya risiko menurun setelah penyesuaian komprehensif untuk faktor perancu; Namun, kami menunjukkan hal itu tetap signifikan secara statistik. Penjelasan yang mungkin untuk hubungan ini dapat menjadi peningkatan viskositas darah karena ekspansi volume plasma yang tidak memadai; karena itu, ini dapat mempengaruhi janin yang sedang berkembang dan mengurangi aliran darah plasenta. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa ekspansi yang tidak memadai selama kehamilan terkait dengan peningkatan risiko berbagai hasil persalinan yang buruk, termasuk kelahiran prematur (Frenkel et al. [1995](#)).

Karakteristik lain yang menonjol dari penelitian ini adalah wanita yang melahirkan bayi prematur lebih banyak mengikuti kunjungan tindak lanjut kehamilan dibandingkan dengan mereka yang melahirkan bayi cukup bulan. Menurut Pedoman Praktik Kedokteran Keluarga oleh Kementerian Kesehatan Turki, wanita hamil yang tidak berisiko harus menghadiri setidaknya tiga kunjungan tindak lanjut kehamilan; jumlah kunjungan dapat meningkat pada

wanita berisiko. Sebagai anemia selama kehamilan telah dianggap sebagai faktor risiko, penjadwalan lebih banyak kunjungan tindak lanjut untuk wanita hamil yang anemia dapat dibenarkan (Keag et al. [2014](#)).

Penelitian kami juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini dilakukan hanya di dua pusat; ini disebabkan oleh populasi yang rendah. Ada kurangnya homogenitas antara kelompok pada penelitian kami. Keduanya menyebabkan kekuatan statistik, yang menunjukkan kecenderungan dan tidak dapat diterapkan untuk populasi umum. Kedua, penyebab anemia tidak ditentukan. Karena itu, pertanyaan mengenai tipe anemia yang mana yang menyebabkan pernikahan prematur?

8. KESIMPULAN

Anemia selama kehamilan mungkin berhubungan dengan kelahiran prematur dan ini harus diperbaiki. Wanita hamil seharusnya menjalani program tindak lanjut yang lebih ketat.

Pernyataan pengungkapan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

PICO VIA

1. Population

Populasi penelitian ini adalah wanita hamil yang dikumpulkan dari delapan pusat kesehatan keluarga dari Kota Duri dan Kota Dumai , yang memiliki

catatan dan kehamilan mereka terdeteksi antara 1 Januari 2017 dan 1 Desember 2017. Semua ibu yang berpartisipasi dalam penelitian ini telah menghadiri setidaknya tiga kunjungan tindak lanjut kehamilan dengan dokter keluarga mereka (setidaknya satu kunjungan di setiap trimester). Para wanita yang tidak secara teratur menghadiri kunjungan tindak lanjut untuk alasan apa pun, mereka dengan nilai Hb yang hilang di salah satu kunjungan tindak lanjut, mereka dengan kehamilan ganda dan mereka yang didiagnosis dengan penyakit kronis, plasenta previa, atau ablasio plasenta dikeluarkan dari penelitian.

2. Intervention

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain kohort prospektif, sehingga tidak dilakukan intervensi pada subjek penelitian.

3. Comparison

Pada penelitian ini dilakukan perbandingan risiko kelahiran prematur pada tiga kelompok populasi, yakni: (1) pasien yang memiliki kadar Hb<10 g/dl; (2) pasien yang memiliki kadar Hb≥10 g/dl dan <11 g/dl; (3) pasien yang memiliki kadar Hb≥11 g/dl.

4. Outcome

Pada pemeriksaan karakteristik sosiodemografi ditemukan bahwa

57,7% bayi prematur adalah laki-laki ($n = 109$) dan 42,3% di antaranya adalah perempuan ($n=80$). Cara persalinan operasi sesar dalam 75,7% ($n = 143$) dari ibu dengan persalinan prematur dan persalinan pervaginam 51% ($n = 150$) dari ibu yang melahirkan bayi cukup bulan; perbedaan antar kelompok adalah signifikan secara statistik ($p<0,001$). Dari para wanita yang melahirkan bayi prematur, 51,3% ($n = 97$) telah hadir tiga atau lebih kunjungan tindak lanjut kehamilan selama kehamilan, sedangkan tiga atau lebih kunjungan tindak lanjut adalah 1,7% ($n = 5$) pada wanita yang melahirkan bayi cukup bulan ($p<0,001$).

Kadar Hb rata-rata selama kehamilan adalah $10,89 \pm 0,85$ mg/dl di wanita yang melahirkan bayi prematur; 68,8% ($n =130$) dari para wanita yang menderita anemia. Kadar Hb rata-rata selama kehamilan adalah $11,66 \pm 0,85$ mg/dl pada wanita kontrol yang melahirkan bayi cukup bulan; dan 23,81% ($n = 70$) wanita ini menderita anemia. Ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok ($p<0.001$). Usia rata-rata ibu yang melahirkan bayi prematur berusia $30,56 \pm 5,84$ tahun, dan ini lebih rendah dibanding kelompok kontrol ($32,23 \pm 5,89$) ($p<0,05$).

Dalam analisis kasar, wanita dengan kadar Hb rendah ($Hb<10$ g/dl) memiliki peningkatan angka kelahiran

prematur (OR, 2,42; 95% CI, 1.07-5.49). Meskipun faktor-faktor perancu seperti usia, tingkat pendidikan ibu, jenis kelamin bayi dan panjang kehamilan ibu ditambahkan ke analisis, anemia terus berdampak pada kelahiran prematur (d disesuaikan OR, 2,06; 95% CI, 1,98-4,30).

5. *Validity*

- Apakah fokus penelitian sesuai dengan tujuan penelitian?

Ya, fokus penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kelahiran prematur dan anemia ibu.

- Apakah subjek penelitian diambil dengan cara yang tepat?

Ya, subjek penelitian diambil dari wanita hamil yang dikumpulkan dari delapan pusat kesehatan keluarga dari Kota Duri dan Kota Dumai , yang memiliki catatan dan kehamilan mereka terdeteksi antara 1 Januari 2017 dan 1 Desember 2017. Semua ibu yang berpartisipasi dalam penelitian ini telah menghadiri setidaknya tiga kunjungan tindak lanjut kehamilan dengan dokter keluarga mereka (setidaknya satu kunjungan di setiap trimester). Para wanita yang tidak secara teratur menghadiri kunjungan tindak lanjut untuk alasan apa pun, mereka dengan nilai Hb yang hilang di salah satu kunjungan tindak lanjut, mereka dengan kehamilan ganda dan mereka

yang didiagnosis dengan penyakit kronis, plasenta previa, atau ablasio plasenta dikeluarkan dari penelitian.

- Apakah data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian?

Ya, data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan berupa kadar Hb pada trimester pertama dan kedua dan dihitung kadar Hb rata-rata.

- Apakah penelitian ini memiliki jumlah subjek yang cukup untuk meminimalisasi kebetulan?

Tidak dapat ditentukan, karena peneliti tidak mencantumkan penghitungan ukuran sampel minimal.

- Apakah analisis data dilakukan dengan cukup baik?

Ya analisis dilakukan dengan baik menggunakan regresi logistik univariat dan multivariat.

6. Importance

Apakah penelitian ini penting?

Ya, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui hubungan antara

kelahiran prematur dan anemia ibu. Hasil penelitian ini penting karena dapat mengurangi risiko kelahiran prematur dengan mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil pada trimester pertama dan kedua.

7. Applicability

Apakah penelitian ini dapat diaplikasikan?

Ya, hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dalam lingkungan RSUP Moh. Hoesin Palembang.

PENINGKATAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS III A PADA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS MELALUI *ENGLISH CORNER* DI SD NEGERI 22 KOTA PRABUMULIH

Oleh:

1. Rinny Febriyanti
Guru SDN 22 Prabumulih
2. Srisnawati
Widyaiswara BPSDMD Prov. Sumsel

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas III A SDN 22 prabumulih pada pembelajaran bahasa inggris dengan menggunakan program english corner. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian tindakan kelas (PTK). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran bahasa inggris dengan program english corner dapat meningkatkan minat belajar siwa kelas III A SDN 22 Prabumulih.

Kata Kunci : Hasil belajar, English Corner, PTK, Bahasa Inggris.

Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia menggunakan sistem Kurikulum 2013, dimana pembelajarannya menggunakan pendekatan *scientific* dan materi pelajarannya disajikan dengan tema yang saling terintegrasi (tematik). Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya.

Proses belajar mengajar di sekolah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pencapaian visi misi sekolah, pendidikan dan tujuan bangsa Indonesia. Guru dalam proses belajar

mengajar sebenarnya telah menyampaikan materi dengan baik, namun minimnya penggunaan model pembelajaran yang digunakan membuat pembelajaran terasa membosankan bagi siswa. Guru memiliki peran aktif dan dituntut untuk memiliki kemampuan khusus dalam mengajar terutama yang berkaitan dengan penggunaan model pembelajaran yang didalamnya terdapat tentang bagaimana pengaplikasian metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang harus mempertimbangkan keragaman kemampuan peserta didik dan juga perkembangan zaman. Sehingga proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan

permasalahan tersebut maka perlu inovasi model pembelajaran yang mampu membangkitkan semangat, motivasi, kreativitas dan percaya diri siswa agar lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Mendorong pengembangan potensi yang dimiliki oleh siswa secara maksimal dan mampu mengkonstruksi pengetahuan dari apa yang telah dipelajari dan dialaminya secara langsung

Dengan bergantinya kurikulum 2006 (kurikulum tingkat satuan pendidikan) menjadi kurikulum 2013 terdapat beberapa perubahan terkait dengan mata pelajaran yang di berlakukan dalam pembelajaran di sekolah dasar (SD). Mata pelajaran menjadi salah satu mata pelajaran yang dihapuskan dalam kurikulum 2013. Dimana bahasa Inggris menjadi pelajaran muatan lokal saja. Alasan tersebut didasarkan atas banyaknya generasi muda saat ini yang tidak bisa bahasa Indonesia yang benar dan baik ,dengan ditiadakannya bahasa Inggris untuk SD agar siswa dapat memperkuat kemampuan berbahasa Indonesia sebelum mempelajari bahasa asing.

Bahasa Inggris sebaiknya sudah di persiapkan sejak usia dini sebagai investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul dan siap bersaing dengan dunia internasional Memang sejauh ini juga

harus diakui dengan jujur pemberlakuan mata pelajaran bahasa Inggris masih perlu perbaikan, dimana guru banyak terpaku pada buku bahasa inggris dari penerbit yang melulu tentang grammar atau structure seharusnya pembelajaran lebih ditekankan dengan kosa kata yang beragam sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Sehingga minat belajar siswa rendah pada pembelajaran bahasa Inggris, Maka berdasarkan angket yang di berikan kepada siswa kelas III A yang berjumlah 20 siswa. hanya 3 siswa yang menyukai bahasa inggris atau hanya 15% siswa yang menyukai bahasa Inggris dan 17 Siswa tidak menyukai bahasa Inggris atau 85% siswa tidak menyukaiki bahasa Inggris dengan alasan bahasa Inggris sulit, membosankan, kurangnya fasilitas gahasa Inggris dan metode pembelajaran tidak bervariasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil isu Kurangnya Minat Belajar Siswa Kelas III A Pada Pembelajaran Bahasa Inggris SD Negeri 22 Prabumulih. Untuk mengatasi kurangnya minat siswa tersebut peneliti mencoba menggunakan program english corner.

Tujuan Penelitian

Dengan tersedianya *English Corner* diharapkan dapat meningkatkan minat baca pada pelajaran bahasa Inggris di kelas III A di SD Negeri 22 Prabumulih.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di SD Negeri 22 Kota Prabumulih.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan aktualisasi yang dilakukan sebagai syarat penyelesaian dari pelatihan dasar (Latsar) CPNS tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas III A SDN 22 Prabumulih. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan Kelas (PTK) dengan satu siklus.

Kajian Pustaka

English Corner

Program english corner merupakan Program bahasa inggris yang memiliki materi pembelajaran yang telah dikemas secara singkat jelas dan mengambil tema atau bahan bahasan dari keseharian siswa. Program ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah lebih mudah dimengerti dan lebih asik untuk dimainkan atau dilaksanakan sehingga siswa yang bebal dalam belajar bahasa inggris pun bisa menjadi hafal karena memang program ini dibuat agar belajar menjadi lebih menyenangkan namun tetap bersifat efektif dan efisien.

Program english corner adalah ruang pembelajaran Bahasa Inggris terbuka bagi siapa saja yang memiliki

ketertarikan untuk belajar dan atau berbagi pengetahuan bersama; tanpa ada batasan usia, pendidikan, status sosial dan lain sebagainya. (studenta). Program english corner dalam situasi sekolah dapat berupa ajang lomba berbahasa Inggris bagi siswa seperti story telling, debates, guess the word, anagram, menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris dan lain-lai. Program english corner dapat dibuat dalam video singkat yang disebar di media sosial seperti whatsapp, Instagram, tiktok, Facebook dan lain sebagainya dengan harapan bahwa semua siswa bisa ikut belajar dimanapun dan kapanpun.

Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang memaparkan terjadinya sebab-akibat dari perlakuan, sekaligus memaparkan apa saja ketika perlakuan diberikan, dan memaparkan seluruh proses sejak awal pemberian perlakuan sampai dengan dampak dari perlakuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK adalah jenis penelitian yang memaparkan baik proses maupun hasil, yang melakukan PTK di kelasnya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya.

Model penelitian yang merujuk pada proses pelaksanaan penelitian yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc.

Taggart (2015, hlm. 17), pelaksanaan penelitian ini (terdiri dari empat tahap yaitu (1) Perencanaan (planning), (2) Pelaksanaan tindakan (acting), (3) Pengamatan atau observasi (observing), dan (4) Refleksi (reflecting).

Penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Suparmoto (2011) menyebutkan bahwa metode hafalan dengan pemberian kosakata secara rutin setiap hari kepada siswa terbukti dapat meningkatkan minat siswa terhadap bahasa Inggris. Fitriana (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa model yang kreatif dan dapat merangsang imajinasi anak,

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau biasa disebut dengan istilah (classroom action research). Hal ini karena penelitian tindakan kelas mampu menawarkan pendekatan dan prosedur yang mempunyai dampak langsung bentuk perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang memaparkan terjadinya sebab-akibat dari perlakuan, sekaligus memaparkan apa saja ketika perlakuan diberikan, dan memaparkan seluruh proses sejak awal pemberian perlakuan sampai dengan

dampak dari perlakuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas atau PTK adalah jenis penelitian yang memaparkan baik proses maupun hasil, yang melakukan PTK di kelasnya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya

Design Penelitian

Penelitian tindakan kelas (PTK) memiliki prosedur atau aturan yang perlu diperhatikan. Prosedur tersebut berguna bagi para guru yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK). Arikunto (2013, hlm.17), dalam Iskandar (2015, hlm. 23) menjelaskan bahwa satu siklus penelitian tindakan kelas (PTK) terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Layaknya sebuah penelitian, PTK juga memiliki prosedur atau aturan yang perlu diperhatikan. Prosedur tersebut berguna bagi para guru yang akan melaksanakan PTK.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian yang merujuk pada proses pelaksanaan penelitian yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc. Taggart (2015, hlm. 17), pelaksanaan penelitian ini (terdiri dari empat tahap yaitu (1) Perencanaan (planning), (2) Pelaksanaan tindakan

(acting), (3) Pengamatan atau observasi (observing), dan (4) Refleksi (reflecting)

Subjek penelitian

. Subjek Penelitian Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas III A SDN 22 Kota Prabumulih tahun ajaran 2020/2021 dengan jumlah siswanya 20 orang, terdiri dari orang siswa 11 orang siswa laki-laki dan orang 9 siswa perempuan. Adapun dipilihnya siswa kelas IIIA SDN 22 Kota Prabumulih peneliti sendiri adalah sebagai guru kelas pada kelas tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan atau observasi pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi sikap diri, lembar wawancara, lembar pre test dan post test dan dokumentasi (foto kegiatan pembelajaran).

Hasil Penelitian

Penelitian ini berjalan dalam satu siklus, yang dalam setiap siklusnya berlangsung dua kali pertemuan atau pembelajaran tatap muka (setiap pertemuan = 2 x 45

menit). Pada siklus penelitian terdiri dari 4 (empat) tahap kegiatan utama, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan aktivitas belajar dan prestasi belajar siswa melalui instrumen pengumpul data yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah melalui format observasi dan lembar soal tes yang telah disiapkan oleh guru.

Siklus Pembelajaran

1) Tahap Perencanaan

- a. ***Menyiapkan lokasi , bahan dekorasi dan jadwa kegiatan ke English Corner..***

kegiatan ini dilakukan tanggal 02- 07 Maret 2022

- b. ***Membuat English corner,***

Membuat rak *English calender, feeling Cabinet*, Media jam serta pohon literasi Kegiatan ini dilakukan tanggal 09-16 Maret 2020

- c. Membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran , soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang mendukung. Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 17-18 Maret 2022

2) Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 19 – 20 maret 2022

- a. Melakukan pretest.
- b. Menyampaikan materi

- c. Mengecek pemahaman siswa dan memberikan umpan balik dengan bertanya secara acak berkaitan dengan *time* dan *calender*.
- d. Memberikan tugas latihan . Guru memberikan 1 soal evaluasi untuk dikerjakan secara individu.
- e. Memberikan *posttest*

HASIL PEMBAHASAN

Untuk melihat nilai siswa hasil dari pre-test dan post-test dapat dilihat dari Tabel.1. dibawah ini.

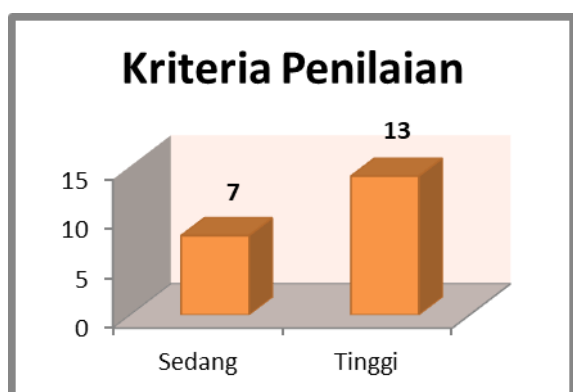
Tabel 1. Rekapitulasi Gain Ternormalisasi

No.	Nama	Nilai Siswa		Gain Ternormalisasi	
		Pre - test	Post-test		
1.	Regina Anugerah	20	70	0,63	Sedang
2.	Asya Karina	45	100	1,00	Tinggi
3.	Anggita Sari	30	75	0,64	Sedang
4.	Andre yan Saputra	40	70	0,50	Sedang
5.	Anugerah pratama	25	95	0,93	Tinggi
6.	Adil lio Alfaro	10	70	0,67	Sedang
7.	Bunga Lestari	30	80	0,71	Tinggi
8.	Dinda Sri oktaviani	70	100	1,00	Tinggi

9.	Desta Putri Ananda	40	95	0,83	Tinggi
10.	Hussen Attarsyah	20	75	0,63	Sedang
11.	Okta Saputra	20	75	0,69	Sedang
12.	Rehan	25	95	0,88	Tinggi
13.	Raepandu	30	95	0,93	Tinggi
14.	Rizky Aditia	40	95	0,92	Tinggi
15.	Ricky Erlangga	50	95	0,90	Tinggi
16.	Ricky Pramawardana	20	70	0,63	Sedang
17.	Rifki Alpino	50	95	0,90	Tinggi
18.	Rika Kriteria Rahim	40	90	0,83	Tinggi
19.	Thalita Anindia	55	95	0,89	Tinggi
20.	Vino Alafareda	40	95	0,92	Tinggi
	Jumlah	700	1730	16,03	
	Rata-rata	35	87	0,80	

Berdasarkan hasil Gain ternormalisasi yang ada pada tabel diatas maka untuk mempermudah melihat kriteria perolehan skor n-gain, disajikan pada gambar dibawah ini:

Diagram batang gain ternormalisasi



Berdasarkan diagram batang diatas, terdapat dua kategori perhitungan nilai n-gain siswa. Sebanyak 7 siswa memperoleh kategori sedang dan 13 siswa mendapat kategori tinggi.

Penilaian hasil belajar dilakukan berdasarkan nilai dari hasil pre-test dan post-test siswa. Hasil analisis nilai pre-test dan post-test disajikan pada tabel rekapitulasi gain ternormalisasi, Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan siswa pada kompetensi pengetahuan dengan pembelajaran menggunakan alat peraga *Media of Time* dan *Calender* Pada mata pelajaran Bahasa Inggris menunjukkan peningkatan.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pretest Siswa Kelas III A Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris

No.	Nama Siswa	Nilai	Keterangan		%
			Tun tas	Tdk Tun tas	

1	Regina	20		√	$\frac{1}{20} \times 100\% = 5\%$ (Belum Berhasil)
2	Asya Karina	45		√	
3	Anggita Sari	30		√	
4	Andre yan Saputra	40		√	
5	Anugerah pratama	25		√	
6	Adilio Alfaro	10		√	
7	Bunga Lestari	30		√	
8	Dinda Sri oktavian	70	√		
9	Desta Putri Ananda	40		√	
10	Hussen Attarsyah	20		√	
11	Okta Saputra	20		√	
12	Rehan	25		√	
13	Raepandu	30		√	
14	Rizky Aditia	40		√	
15	Ricky Erlangga	50		√	

16	Ricky Prama wardana	20		√
17	Rifki Alpino	50		√
18	Rika Rahim	40		√
19	Thalita Anindia	55		√
20	Vino Alafareda	40		√
	Jumlah	695		
	Rata-rata	35		

9	Desta Putri Ananda	95	√
10	Hussen Attarsyah	75	√
11	Okta Saputra	75	√
12	Rehan	95	√
13	Raepandu	95	√
14	Rizky Aditia	95	√
15	Ricky Erlangga	95	√
16	Ricky Prama wardana	70	√
17	Rifki Alpino	95	√
18	Rika Rahim	90	√
19	Thalita Anindia	95	√
20	Vino Alafareda	95	√
	Jumlah	1730	

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Postest Siswa Kelas III A Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris

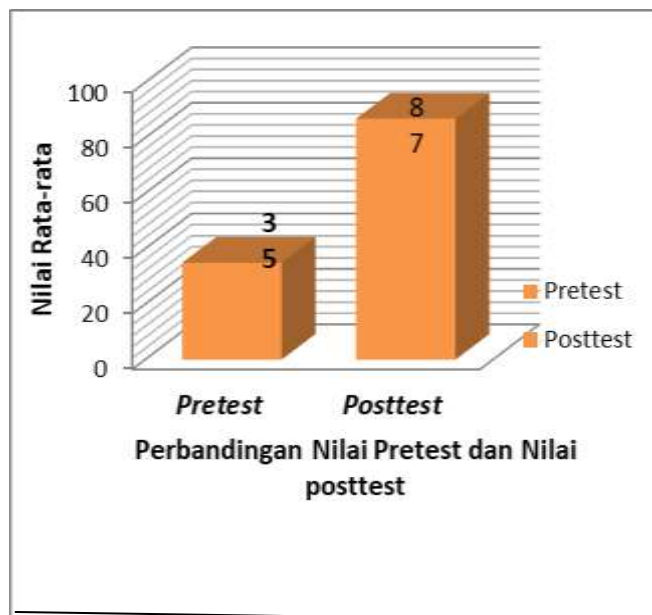
No	Nama Siswa	Nilai	Keterangan		Rata-rata	%	87
			Tuntas	Tidak Tuntas			
1	Regina Anugerah	70	√				
2	Asya Karina	100	√				
3	Anggita Sari	75	√				
4	Andre yan Saputra	70	√				
5	Anugerah pratama	95	√				
6	Adil lio Alfaro	70	√				
7	Bunga Lestari	80	√				
8	Dinda Sri oktaviani	100	√				

Pada tabel rekapitulasi nilai pretest dan posttest diatas bisa dilihat sebanyak 19 siswa tidak tuntas pada saat menjawab soal pretest. Siswa dikatakan tuntas apabila skor yang diperoleh ≥ 65 sesuai KKM yang ada pada sekolah. Rata-rata skor pre-test siswa yaitu 35, dengan demikian ketuntasannya yaitu 5%, artinya hanya ada 1 siswa yang dapat mencapai ketuntasan pada materi *Time* dan *Calendar* sebelum dilakukannya pembelajaran menggunakan alat peraga.

Sedangkan Pada post-test terjadi peningkatan ketuntasan nilai, semua siswa tuntas. Rata-rata skor post-test siswa yaitu sebesar 87. Persentase ketuntasan siswa pada post-test sebesar 100%.

Hasil peningkatan ketercapaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat dengan hasil analisis ngain ternormalisasi yang disajikan pada tabel rekapitulasi gain ternormalisasi. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata perolehan nilai pretest dan posttest mengalami peningkatan sebesar 95%, selain itu rata-rata perolehan nilai n-gain sebesar 0,80 dengan kategori tinggi. Hal ini membuktikan bahwa adanya *English Corner* pada pembelajaran dengan menggunakan alat peraga *Media of Time* dan *Calender* ini siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan berdampak ke minat belajar dan hasil belajar siswa.

Diagram batang perbandingan nilai pretest dengan nilai posttes



PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembelajaran dengan menggunakan program english corner khususnya menggunakan *Media of Time* dan *Calender* pada mata pelajaran Bahasa Inggris, terjadi hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 95%, selain itu rata-rata perolehan nilai n-gain sebesar 0,87 dengan kategori tinggi.
2. Adanya pembelajaran dengan menggunakan program english corner dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas III A pada mata pelajaran Bahasa Inggris SD Negeri 22 Kota Prabumulih.

SARAN

1. Perlunya dukungan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan mengajar para guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif sebagai upaya peningkatan keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar
2. Perlunya dukungan Kepala sekolah agar guru dapat mengetahui bahwa penggunaan alat peraga dalam pembelajaran sangat berpengaruh dalam hal membangkitkan minat siswa dalam belajar.

. DAFTAR PUSTAKA

- Fitriana,Rahmawati, 2018, Minat dan Motivasi dalam belajar Bahasa Inggris siswa kelas IV SDN Kota Samarinda.SNITT Poltek Balikpapan.
- Huda, Miftahul. (2013).Model-model Pengajaran dan Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- K, Areola,2021, English Corner: Pojok Belajar untuk anak-anak, Kompasiana,
<https://www.kompasiana.com/arkadas5046/6103c1351525100c0c2473d2/> diundak tanggal 25 Januari 2023 pukul 9.30 wib.
- Megista ,Dwi Putri. 2019. Upaya Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar (SD).garuda992088 (17 Februari 2020) search)", <http://www.ktiguru.org/>
- Nana Sudjana,1989, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: Penerbit PT Remaja, .
- Sulipan ,....., Bimbingan Karya Tulis Ilmiah Online, "Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action
- Suparnoto,2011, Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Inggris dengan metode hapalan lewat pemberian kosa kata secara rutin setiap hari.Didaktika vol 7 no 2
- Fitriana, 2018, Minat dan Motivasi dalam belajar Bahasa Inggris siswa kelas IV SDN Kota Samarinda.SNITT Poltek Balikpapan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Pelatihan Kepala Sekolah Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sumatera Selatan

**Farhat Syukri BPSDM
SUMSEL**

farhatsyukri@yahoo.co.id

Abstract

Human resource development has become the government's concern in improving the quality of teachers and education staff. Teachers as teaching staff have a strategic role in realizing the foundation of the formation of quality human resources through formal education. Therefore the Ministry of Education and Culture revise the assignment of the teachers as principals policy with issuance of Minister of Education and Culture number 6 of 2018 concerning the Assignment of Teachers as Principals. This regulation is implemented by the Principal Development and Empowerment Institute (LPPKS). Human Resources Development Agency (BPSDMD) of South Sumatra Province is one of the regional governments that collaborates with LPPKS. Therefore this study aims to describe the implementation of the school principal's education and training policies in BPSDMD of South Sumatra Province. This study uses a qualitative approach, through the analysis of the policy implementation method of George C Edwards III. This study identifies several factors that influence the policy implementation process. The results of the study indicate that the Minister of Education and Culture number 6 of 2018 mandates the necessity of prospective school principals to obtain certificates and the obligation of principals to have certificates to be followed up through the implementation of School Principal Strengthening Training. But not all stakeholders in this case the Provincial Government and Regency Government have budgeted funding for the Principal to attend School Principal Training Education in BPSDMD of South Sumatra Province. The organization of Education and Training in 2018 was followed by the school principal with funding from each participant.

Keywords: *policy implementation; education policy; human resource development*

Abstrak

Pembangunan sumber daya manusia telah menjadi perhatian pemerintah dalam peningkatan kualitas tenaga guru dan tenaga kependidikan. Guru sebagai tenaga pengajar mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pondasi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan formal. Karena itulah pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan revisi kebijakan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Peraturan ini diimplementasikan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu pemerintah daerah yang melakukan kerjasama dengan LPPKS. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah di BPSDMD Provinsi Sumsel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode analisis implementasi kebijakan George C Edwards III. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbud nomor 06 tahun 2018 yang mengamanatkan keharusan calon kepala sekolah memperoleh sertifikat dan kewajiban kepala sekolah memiliki sertifikat telah ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Namun belum semua pemangku kepentingan dalam hal ini Pemprov dan Pemkab menganggarkan pembiayaan bagi Kepala Sekolah untuk mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepala Sekolah di BPSDMD Provinsi Sumsel. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 ini, diikuti oleh kepala sekolah dengan dana dari masing-masing peserta.

Kata Kunci: *implementasi kebijakan; kebijakan pendidikan; pengembangan SDM,*

PENDAHULUAN

Sebagai sektor terdepan yang bertanggungjawab di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan terus dibenahi dengan melakukan penyempurnaan peraturan/regulasi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Guru dan tenaga kependidikan merupakan komponen utama dalam meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Kualitas output sdm pada pendidikan formal sangat tergantung dari kualitas guru yang menjadi tenaga pengajarnya. Peran kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah sangat signifikan dalam menentukan kualitas pendidikan dan anak didik. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah perlu terus meningkatkan kompetensi menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kepala sekolah, pada tahun 2010 Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Permendiknas ini antara lain mengatur tentang persyaratan kompetensi guru yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah. Setiap Guru yang diusulkan menjadi bakal calon kepala sekolah wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah (CKS). Diklat CKS diselenggarakan oleh lembaga penyiapan calon kepala sekolah yang terakreditasi.

Ketentuan peralihan pada Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tersebut masih memberikan toleransi kepada kepala sekolah yang sedang menjabat. Pasal 17 berbunyi "pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat

kepala sekolah/madrasah sampai selesai masa tugasnya".

Permendiknas 28/2010 telah berlaku selama 8 tahun lebih. Setelah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia pendidikan dewasa ini, dan guna mewujudkan nawa cita pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor pendidikan, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Permendikbud ini mencabut Permendiknas nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala

Sekolah/Madrasah. Permendikbud nomor 6 tahun 2018 ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada tanggal 22 Maret 2018, serta diundangkan dan berlaku mulai tanggal 9 April 2018.

Menurut analisis dan pengamatan peneliti ada beberapa hal prinsip dari Peraturan Menteri tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, antara lain:

1. Seleksi bakal Calon kepala sekolah; Pada Permendiknas nomor 28 tahun 2010, seleksi administratif dan akademik dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada Permendikbud 6/2018, seleksi administratif dilaksanakan oleh Dinas, sedangkan seleksi substantif (akademik) dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Pasal 8 Permendikbud 6/2018 juga menegaskan kedudukan LPPKS; sebagaimana tertuang pada ayat (3) LPPKS dalam hal melaksanakan pendidikan dan pelatihan dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang menyeenggarakan pendidikan dan pelatihan.
2. Ketentuan pada pasal peralihan; Jika pada Permendiknas 28/2010 menyatakan Kepala Sekolah yang

masih menjabat tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat Kepala Sekolah, Permendikbud nomor 6 tahun 2018 dengan tegas mensyaratkan sertifikasi bagi Kepala Sekolah yang sedang menduduki jabatan. Lebih lanjut pasal 21 Permendikbud 6 tahun 2018 berbunyi: (e). Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah; (f). Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali; (g) . Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf f, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada kepala Dinas Pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya;

Seleksi substantif terhadap calon kepala sekolah ini telah dilaksanakan oleh LPPKS. Untuk seleksi substantif di Provinsi Sumatera Selatan, LPPKS telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di provinsi Sumsel, juga dilaksanakan LPPKS bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2017 lalu.

Adanya kerja sama dalam pelaksanaan seleksi substantif dan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan calon kepala sekolah dan pendidikan dan pelatihan Penguatan Kepala Sekolah di BPSDMD, telah meningkatkan kinerja BPSDMD Sumsel. Berdasarkan informasi kepala bidang teknis fungsional BPSDMD Provinsi Sumsel, LPPKS telah melakukan MOU dengan 5 (lima) BPSDMD di Indonesia. Kelima provinsi yang telah menandatangani kerjasama dengan LPPKS adalah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Namun dari lima provinsi tersebut, BPSDMD Sumsel yang telah mengimplementasikan MOU dengan menyelenggarakan seleksi substantif, pendidikan pelatihan Calon Kepala Sekolah, dan pendidikan pelatihan Penguatan Kepala Sekolah. Kerjasama LPPKS dengan lembaga pendidikan dan pelatihan seperti BPSDMD Sumsel ini merupakan bentuk sinergi kerjasama yang dapat dijadikan model bagi provinsi lainnya di Indonesia.

Memperhatikan data sekolah di Sumatera Selatan yang bersumber dari Data Pokok (Dapo) Dikdasmen Dikbud, jumlah sekolah SD, SMP, SMA, SMK, SLB negeri dan swasta di Sumsel sebanyak 6.944 unit sekolah. Dengan demikian dapat diasumsikan jumlah kepala sekolah sebanyak 6.944 orang.

Tabel 1

Jumlah Satuan Sekolah di Sumatera Selatan

N o	WIL AYA H KAB /KOT A	SD	SM P	SM A	SM K	S L B	TO TA L
1	Kota Palembang	37 1	20 8	1 2 1	81	15	796
2	Musi Banyu Asin	46 2	14 9	5 9	24	1	693
3	Banyu Asin	50 0	11 6	5 5	18	3	677
4	Ogan Komering Ilir	46 7	13 8	4 4	27	1	977
5	OKUT	42 5	86	3 8	36	1	586

6	MUARA Enim	37	10	3	19	2	532
7	Lahat	29	74	3	12	1	424
		9		8			
8	Musi Rawas	314	67	2	7	1	41
				6			5
9	Ogan Ilir	264	80	3	16	1	39
				3			4
10	OKUS	278	67	2	10	1	38
				7			3
11	Ogan Komerin g Ulu	199	64	2	13	1	30
				9			5
12	Empat Lawang	184	38	1	4	0	24
				5			1
13	PALI	120	44	2	9	0	19
				3			5
14	Lubuk Linggau	104	33	2	8	2	17
				4			1
15	MURAT ARA	125	29	9	1	0	16
							4
16	Prabumul ih	96	22	1	11	2	14
				5			6
17	Pagar Alam	89	29	9	6	1	12
							5
TOTAL		4.673	1.339	597	30	33	6.94
					2		4

Sumber: Data Pokok Dikdasmen Dikbud tahun 2018

Sementara itu pada pasal peralihan Permendikbud telah mengamanatkan pendidikan dan pelatihan penguatan menjadi frasa baru pada peraturan menteri yang mengatur guru sebagai kepala sekolah yang dituangkan dalam ketentuan peralihan Permendikbud 6/2018. Demi untuk mencapai standar nasional pendidikan dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah, Mendikbud secara tegas dengan mewajibkan semua kepala sekolah wajib mengikuti Diklat penguatan Kepala Sekolah.

Memperhatikan data pokok Direktorat Jenderal Dikdasmen tentang Dapo sekolah, Jumlah SMTA di Sumatera Selatan tahun 2018 sebanyak 899 sekolah. Terdiri dari SMA sebanyak 597 dan SMK sebanyak 302. Dengan ketentuan setiap sekolah dipimpin oleh satu orang kepala sekolah, maka jumlah kepala sekolah menengah tingkat atas di Sumsel sebanyak 899 orang kepala sekolah. Berdasarkan data dari informan kunci, BPSDMD Sumsel

menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah pada tahun 2018 khusus SMA/SMK sebanyak 210 orang. Peserta yang telah menduduki jabatan kepala sekolah sebanyak 120 orang. Sedangkan peserta yang mengikuti diklat penguatan SMA/SMK sebanyak 150 orang. Dari dua diklat tersebut telah menghasilkan kepala sekolah yang bersertifikat sebanyak 270 orang. Dengan demikian diperkirakan masih terdapat 629 orang kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat kepala sekolah tingkat atas.

Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Diklat Teknis Umum dan Fungsional BPSDMD Sdr Iman Subarno, ketika kami wawancara di ruang kerjanya, LPPKS yang berkedudukan di Solo Jawa Tengah telah melakukan kerjasama dengan BPSDMD provinsi Sumsel sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama pada tahun 2017. Kerjasama yang telah terjalin selama dua tahun ini telah menunjukkan kinerja yang baik. Kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain melakukan seleksi bakal calon kepala sekolah, menyelenggarakan diklat TOT, Master of Trainer. Selama tahun 2018 ini penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Diklat Penguatan Kepala Sekolah telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) angkatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Diklat Kepala Sekolah di BPSDMD Provinsi Sumsel dan mengelaborasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Diklat Penguatan kepala Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan Selatan.

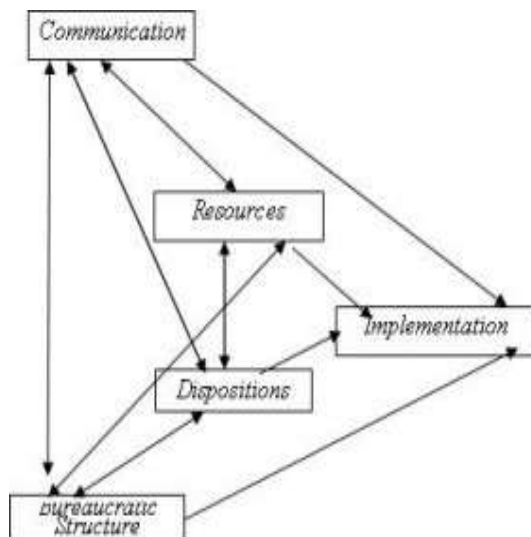
KAJIAN LITERATUR

Penelitian ini menggunakan analisis implementasi kebijakan George C. Edwards III. Sebagai generasi pertama studi implementasi mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu

banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, George C Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

1. *What is the precondition for succesful policy implementation*
2. *What are the primary obstacle to succesful policy implementation.*

Edwad III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.



Gambar 1 Dampak langsung dan tidak langsung dalam Implementasi

Sumber : George III Edward :*implemeting public policy*, 1980

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi (*communication*)

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan- tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

b. Sumberdaya (*Resource*)

Jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasidikirim bukan hal utama implementasi kebijakan, namun jika bertanggungjawab untuk melaksanakan program tersebut dirasakan tidak memadai, ini akan menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi (*Disposition*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan

melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya, sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

d. Struktur Birokrasi (*beaurecracy structure*)

Birokrasi merupakan salah-satu unit kerja / institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan yang bersifat kompleks

Kepala Sekolah ialah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan menajemen (SMN), jenjang karier dari jabatan fungsional guru.

Apabila seorang guru mempunyai kompetensi sebagai Kepala Sekolah dan telah memenuhi persyaratan atau tes tertentu maka guru tersebut sanggup memperoleh jabatan Kepala Sekolah.

Sedangkan menurut Permendikbud nomor 06 tahun 2018; Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak

menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure(SOP) dan fragmentasi.

Wahjsumijo (2004) mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Vaitzal Rivai (2004) menjelaskan makna Kepala sekolah berasal dari dua kata kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin. Sedangkan sekolah diartikan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat aktivitas mengajar belajar. Sekolah pun menjadi lingkungan hidup sesudah rumah, dimana anak tinggal beberapa jam, sebagai tempat tinggal di masa perkembangan, dan sebagai lembaga pendidikan, tempat tinggal yang berfungsi mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan.

Menurut Mulyasa (2007: 24), pengertian kepala sekolah ialah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMN), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisa data model interaktif yang

terdiri dari tiga komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Sumber utama penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder (misalnya, Badan Pusat Statistik, laporan, notulen rapat, dan sebagainya), organisasi non-pemerintah, dan informasi yang tersedia di internet. Informan kunci penelitian ini berasal dari beberapa organisasi perangkat daerah terkait, Kepala BPSDMD Prov Sumsel dan Kepala Bidang, Lembaga Pengembangan dan pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), widyaiswara, Kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan nara sumber lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi, pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumsel. Penelitian ini difokuskan untuk mengelaborasi: (a) tujuan program pendidikan dan pelatihan guru sebagai kepala sekolah; (b) sumber daya yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi Permendikbud nomor 6 tahun 2018 di Provinsi Sumsel; (c) kualitas hubungan interorganisasional; (d) karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana, termasuk di dalamnya; kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hirarki pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan, dan lain sebagainya; (e) lingkungan politik, sosial dan ekonomi; dan (f) disposisi atau tanggapan, sikap para pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepala Sekolah di BPSDMD Provinsi Sumsel diawali dengan pendekatan pro aktif yang dilakukan oleh BPSDMD Sumsel. Dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disandanginya menjadikan , BPSDMD mempunyai fleksibilitas

dalam pengelolaan keuangan guna melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan diklat. Adanya keluwesan dalam operasionalnya, membuat manajemen BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel berperan aktif melakukan kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan berbagai lembaga/instansi vertikal maupun instansi di lingkungan Pemprov, Pemkab, Pemkot dan lembaga pendidikan swasta yang ada di Sumatera Selatan.

Manifestasi dari kerjasama tersebut telah direalisasikan dalam Perjanjian kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Perjanjian tersebut tertuan dalam PKS nomor 890.3/1540/BPSDMD/IV/2017 tanggal 16Juni 2017.

Pada Perjanjian Kerja Sama tersebut, LPPKS sebagai lembaga yang diberikan otoritas oleh Mendikbud dalam pengembangan Kepala Sekolah menunjuk BPSDMD Sumatera Selatan untuk memfasilitasi penyelenggaraan seleksi substantif, Diklat Calon Kepala Sekolah, dan Diklat Penguatan kepala Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data penyelenggaraan Diklat Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018, kinerja BPSDMD Sumsel dalam pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rekap Peserta Diklat Kepala Sekolah

NO M OR	JENIS KEGIATAN/ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA ANGKATAN BER SERTIFIKAT
1	SELEKSI SUBSTANTIF	3 Angkatan 361 orang
2	CALON KEPALA SEKOLAH	3 angkatan 210 orang
3	PENGUATAN KEPALA	4 angkatan 320 orang

Hasil penelitian yang telah dilakukan akan disajikan berdasarkan hasil yang peneliti temukan di lapangan saat penelitian berlangsung serta diadakannya pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai langkah dalam penyajian data, maka peneliti pada tahap ini akan menguraikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian berlangsung, selanjutnya hasil temuan di lapangan akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pendidikan dan pelatihan Kepala Sekolah di Provinsi Sumatera Selatan yang dideskripsikan.

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi Edward III yang mengukur implementasi kebijakan dengan 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi

1. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Nugroho adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah di BPSDMD Sumsel terselenggara dengan lancar. Komunikasi ini dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ini perlu disampaikan kepada stake holder, yaitu Dinas Pendidikan Nasional Sumsel dan Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se-Sumsel, guna mengkomunikasikan kebijakan khususnya program pendidikan dan pelatihan kepala sekolah. Program ini merupakan kerja

sama kerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dengan BPSDMD

Sumsel. Komunikasi kepada stake holder termasuk ke guru dan kepala sekolah dilakukan agar para stake holder dapat mengetahui pelaksanaan diklat kepala sekolah di BPSDMD Provinsi Sumsel.

Dinamika komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampai pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan, serta perubahan sebagai akibat komunikasi. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi di BPSDMD Provinsi Sumsel dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Agustino (2006), penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miscommunication*), sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Transmisi pada implementasi kebijakan Diklat Kepala Sekolah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi Sumsel yang berkerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS), kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut berupa pelaksanaan kebijakan diklat kepala sekolah dalam upaya agar kepala sekolah dapat mengetahui kegiatan tersebut. khususnya kepada kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat agar segera untuk mengikuti diklat Penguatan Kepala Sekolah.

Transmisi dalam implementasi kebijakan Diklat kepala sekolah di Provinsi Sumsel berupa pemberitahuan dan informasi

dari BPSDMD Sumsel ke Dinas pendidikan atau disampaikan langsung ke sekolah terkait. Komunikasi dalam implementasi kebijakan diklat kepala sekolah dilakukan pada saat rapat, pelatihan, workshop, diskusi, bimbingan teknis dan diaolog yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iman Subarno Kepala bidang Teknis Fungsional BPSDMD Sumsel yang menyatakan bahwa bentuk komunikasi yang berkaitan dengan kebijakan diklat kepala sekolah di Sumatera Selatan adalah dengan cara mengikutsertakan para widyaiswara dan instansi terkait dalam dalam rapat, pelatihan, workshop, diskusi, yang dilakukan oleh BPSDMD Sumsel.

b. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Agustino komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Pada pelaksanaan kebijakan Diklat kepala sekolah, agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan terdapat dua metode penyampaian informasi yaitu secara langsung dan tidak langsung yaitu media cetak atau elektroik. Diklat kepala sekolah yang menjadi wewenang LPPKS sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Adanya kerjasama dengan diberikannya lisensi kepada BPSDMD Sumsel, dijelaskan dengan tepat dan konkrit. Dengan demikian para calon kepala sekolah maupun kepala sekolah yang wajib mengikuti diklat penguatan dan memiliki sertifikat, dapat mengikuti diklat kepala sekolah tanpa ada keraguan atau ketidakpastian. Pada pelaksanaan Diklat kepala

sekolah agar penyampaian informasi pelaksanaan tersebut dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka penyampaian informasi ini dilakukan secara langsung. Penyampaian secara langsung ini dinilai cara yang sudah benar dengan melaksanakan rapat, kunjungan kerja audiensi ke dinas kabupaten/kota atau Implementasi Kebijakan Pendidikan Pelatihan Kepala Sekolah melakukan audiensi dengan bupati/walikota dengan melakukan presentase tentang kebijakan tersebut.

c. Konsisten

Menurut Edward III dalam Agustino, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Oleh karena itu konsistensi juga harus mendapat perhatian dalam sebuah komunikasi. Konsistensi dalam implementasi kebijakan diklat kepala sekolah di provinsi Sumsel berdasarkan juklak yang telah ditetapkan oleh Lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah. Kebijakan tersebut berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan dan petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Guru dan tenaga kependidikan.

Konsistensi yang dimaksud dalam hal ini adalah petunjuk teknis dan materi diklat yang telah ditetapkan LPPKS dilaksanakan secara utuh dan komprehensif. Hal ini diungkapkan oleh plt Kepala Badan Pengembangan sumber daya manusia provinsi Sumatera Selatan Bapak Sahrawi Hanan, M.M. Konseskuensi konsistensi yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumsel adalah sangat tepat. Hal ini dikarenakan

sebagai pemegang lisensi penyelenggaraan diklat kepala sekolah, BPSDMD harus menerapkan secara utuh juklak yang telah disusun oleh LPPKS. Apabila pelaksanaannya tidak konsisten dan setengah-setengah maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu mesti dilaksanakan secara menyeluruh dan terus-menerus tanpa terputus. Namun dengan adanya keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018, yang merivisi Permendiknas nomor 28 tahun 2010, telah memberikan arahan yang tepat dalam pelaksanaan diklat kepala sekolah, khususnya kewajiban mengikuti diklat penguatan kepala sekolah bagi kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat kepala sekolah.

2. Sumber Daya

Sumber daya atau resource adalah faktor penting guna terselenggaranya kebijakan dengan baik, karena itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta ditingkatkan *skill* (ketrampilan) yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan Diklat Kepala Sekolah itu sendiri. Menurut George C. Edward III dalam Nugroho, Sumber daya dalam hal ini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (*staff*) dan non manusia (fasilitas atau sarana prasarana).

a. Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal

implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, ~~implementasi kebijakan~~ diklat kepala sekolah di provinsi Sumatera Selatan membutuhkan sumber daya yang mumpuni dan mampu dalam menguasai bidang tugasnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia (*staff*) yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan diklat kepala sekolah adalah widyaiswara dan petugas administrasi / *staff* pada bidang teknis dan fungsional. Selain itu juga sumber daya manusia ini termasuk semua *staff* BPSDMD yang menjadi tenaga inti maupun tenaga supporting dalam pelaksanaan diklat kepala sekolah di provinsi Sumsel.

Adapun struktur staf fungsional bidang teknis yang bertanggung jawab menjalankan fungsi diklat kepala sekolah adalah sebagai berikut: Bidang Pengembangan Teknis Umum dan Fungsional, yang terdiri dari:

- Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
- Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum.
- Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.

Jumlah pegawai staf umum, fungsional dan pejabat struktural sebanyak 10 orang. Terkait sumber daya manusia (*staff*) yang dimiliki bidak teknis fungsional, Bapak Imam Subarno selaku Kepala bidang teknis umum dan fungsional merasakan keterbatasan staf yang dimiliki. Kemampuan staf yang belum menguasai teknologi informasi, dirasakan cukup mempengaruhi keluwesan dan kecepatan dalam pelayanan kebijakan ini.

b. Sumber Daya non Manusia

Selain kemampuan IT yang terbatas, bidang teknis umum

dan fungsional ini merasakan kurangnya dukungan peralatan administrasi maupun dukungan IT seperti personel komputer, note book, maupun fasilitas internet berupa wi fi / hot spot belum tersedia. Prasarana gedung untuk ruang belajar seminar, dan ruang diskusi sudah memadai. namun untuk prasarana asrama peserta diklat masih perlu ditingkatkan. Fasilitas kamar dan kesediaan air bagi peserta masih sering menjadi hambatan. Selain itu kebersihan dan kerapian fasilitas gedung dan sarana lingkungan masih perlu dibenahi. Keterbatasan sumber daya ini juga diakui oleh Pak Sahrudin kepala sub bag perencanaan. Untuk anggaran tahun 2019 sudah diusulkan untuk perbaikan sarana dan prasarana. Namun anggaran APBD belum memungkinkan untuk membiayai penyempurnaan seluruh sarana prasarana tersebut. Hal yang dimungkinkan adalah menggunakan dana BLUD. Hal ini dikareakan BPSDMD Provinsi Sumsel telah ditetapkan sebagai Badan layanan umum daerah (BLUD).

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Menurut Edward III dalam Winarno kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Demikian

pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-persepektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan diklat kepala sekolah di BPSDMD Provinsi Sumsel sangat baik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sahrawi Hanan selaku Plt Ka. BPSDMD Sumsel. Sebagai satu satunya

BPSDMD yang telah ditunjuk LPPKS sebagai penyelenggara dan telah menyeleggarakan diklat kepala sekolah di Indonesia. Tentu ini suatu kepercayaan yang patut dihargai. Adanya kepercayaan penuh dari LPPKS menjadikan semangat para implementor untuk melaksanakan diklat kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab dan berupaya menjalankan semua aturan ketentuan dengan konsisten sesuai petunjuk teknis dari LPPKS.

Selanjutnya Kepala Bidang Teknis Umum menyampaikan bahwa dari 5 (lima) provinsi yang melakukan kerjasama dengan LPPKS, namun baru Sumatera Selatan yang telah menyelenggarakan diklat kepala sekolah. Tahun 2018 ini saja sudah diselenggarakan diklat calon kepala

sekolah sebanyak tiga angkatan, dan diklat penguatan kepala sekolah sebanyak empat angkatan. Terlaksananya diklat tersebut, menunjukkan adanya dukungan sikap dan disposisi dari para implementor untuk mewujudkan kebijakan diklat kepala sekolah di BPSDMD provinsi Sumsel.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedure* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Menurut Edward III dalam Nugroho, menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Pada implementasi kebijakan diklat kepala sekolah di provinsi Sumatera Selatan, peneliti membagi penjelasan hasil mengenai struktur birokrasi menjadi 2 (dua). Kedua hal tersebut adalah standar operating procedure (SOP) dan Fragmentasi.

a. Standar Operating Procedure (SOP)

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan diklat kepala sekolah menggunakan SOP

maupun petunjuk teknis yang telah disusun oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Hal ini dikarenakan BPSDMD sebagai pihak yang menerima lisensi sebagai penyelenggara sebagai tindak lanjut dari nota kesepakatan kedua lembaga. Namun demikian Bidang Teknis Umum dan Fungsional dalam penyelenggaraan diklat di BPSDMD Sumsel juga menggunakan petunjuk teknis penyelenggaraan diklat yang telah ditetapkan oleh Kepala BPSDMD Sumsel. Sementara itu untuk kemudahan proses koordinasi dan kerja sama, surat menyurat, nota dinas dikeluarkan oleh Sekda untuk ke Bupati/walikota maupun ke Kementerian /lembaga diluar provinsi khususnya. Untuk koordinasi dengan instansi terkait seperti Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota, unit sekolah SMA, SMP, dan SD dan instansi terkait lainnya dilakukan langsung oleh Kepala BPSDMD Provinsi Sumsel. Nota Dinas tata naskah juga disusun untuk mempermudah pelaksanaan dan koordinasi dengan LPPKS dalam mempercepat arus administrasi dan teknis pelaksanaan diklat kepala sekolah. adanya Surat menyurat ini setidaknya untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan teknis dan adminisrasi. Dengan demikian permasalahan keterbatasan staf dapat diatasi dengan mekanisme SOP yang dilaksanakan dengan baik dan konsisten.

b. Fragmentasi

Fragmentasi menurut Edward III dalam Winarno adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, pelatihan dan pelayanan. Konsenkuensi paling buruk dalam fragmentasi birokrasi

adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain.

Dalam implementasi kebijakan diklat kepala sekolah di BPSDMD Sumsel, dapat dilihat dari pembagian tugas dalam menyebarkan informasi penyelenggaraan diklat kepala sekolah di BPSDMD Sumsel. Untuk percepatan informasi ke instansi terkait, BPSDMD Sumsel menerapkan fragmentasi yang jelas. Bidang Teknis Umum dan Fungsional menjadi leader dalam penyelenggaraan dan koordinasi dengan LPPKS maupun dengan instansi terkait di Sumatera Selatan. Bidang lainnya seperti Kompetensi inti dan Sekretariat Badan memfasilitasi kelancaran implementasi kebijakan. Widyaiswara sebagai ujung tombak suksesnya penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar juga difasilitasi untuk mengikuti master of Training, maupun diklat penguatan kepala sekolah. Dalam fragmentase ini, widyaiswara juga diberi peran untuk mendiseminasikan informasi kepada semua pihak. setiap ada kegiatan bimtek, diklat manajerial, teknis, widya iswara menyampaikan informasi tentang diklat kepala sekolah. Kepala Bidang Teknis Umum Sdr. Imam Subarno, juga melakukan komunikasi secara langsung tentang *up date* informasi ini ke pihak terkait. komunikasi dengan stake holder ini juga dilakukan oleh Bapak Imam Subarno dengan membentuk whatsapp group yang menginformasikan tentang update kegiatan diklat kepala sekolah yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Sumsel.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan kerjasama antara Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dengan Badan Pengembangan SumberDaya Manusia Provinsi Sumatera Selatan telah dapat mengimplementasikan

kebijakan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. BPSDMD Provinsi Sumsel sebagai pembantu Gubernur telah menjalankan fungsinya di bidang Pendidikan dan Pelatihan pegawai guna mewujudkan nawa cita Presiden RI.

2. Penelitian ini menemukan bahwa Permendikbud nomor 06 tahun 2018 tentang keharusan calon kepala sekolah memperoleh sertifikat dan kewajiban kepala sekolah memiliki sertifikat telah ditindaklanjuti. Namun belum semua pemangku kepentingan dalam hal ini Pemprov dan Pemkab belum mengganggu pembiayaan bagi Kepala Sekolah untuk mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepala Sekolah di BPSDMD Provinsi Sumsel. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tahun 2018 ini, diikuti oleh kepala sekolah dengan dana dari masing-masing peserta. Pemprov/Pemkab/Pemkot belum mengalokasikan biaya diklat penguatan bagi kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat.
3. Kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat kepala sekolah baru mencapai 20 % dari jumlah kepala sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu Diklat Calon Kepala Sekolah sebagian besar diikuti oleh Calon Kepala Sekolah SMTA di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan calon kepala sekolah SMP dan SD, yang dibawah pembinaan Bupati/Walikota belum seluruhnya melakukan kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Sumsel dalam seleksi substantif, dan Diklat Calon KepalaSekolah.
4. Dari empat faktor implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward III, dalam penerapan kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah, dua faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini adalah disposisi dan strukutr birokrasii. Sedangkan faktor komunikasi dan sumber daya belum optimal dalam memberikan dukungan implementasi kebijakan tersebut.
5. Faktor komunikasi menjadi masalah

yang perlu ditingkatkan. Komunikasi internal dalam penyelenggaraan diklat oleh BPSDMD Sumsel telah terlaksana secara konsisten baik oleh staf BPSDM Sumsel. Namun transmisi dalam komunikasi kebijakan dari pihak yang mengeluarkan otoritas Permendikbud nomor 6 tahun 2018 kepada pimpinan daerah atau pengambil keputusan penganggaran di daerah Bupati/Walikota atau kepala dinas pendidikan/Badan Kepegawaian Daerah belum terjalin dengan baik. Sementara itu sumber daya manusia widyaiswara masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan melakukan pendadaran kemampuan teknis manajerial bukan sertifikat semata.

Saran

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 pasal peralihan menegaskan bahwa setiap kepala sekolah wajib memiliki sertifikat kepala sekolah. Diperkirakan kepala sekolah yang memiliki sertifikat baru mencapai 20 % dari data kepala sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Oleh karena itu frekuensi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah di tahun 2019 kiranya dapat ditingkatkan dengan pembiayaan dari pemerintah.
2. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, dan penyiapan fasilitas sumber daya non staff, BPSDMD agar lebih memperhatikan peningkatan kualitas akomodasi, ruang belajar, kamar asrama, hotspot internet, dan kebutuhan lainnya peserta diklat kepala sekolah. Mengingat kemungkinan eskalasi jumlah peserta yang akan meningkat di 2019, untuk mengakomodir kegiatan diklat Kepala Sekolah ini, BPSDMD dapat menggunakan hotel atau asrama milik Pemprov atau swasta di Palembang dan sekitarnya.
3. Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala sekolah, Mendikbud mengeluarkan regulasi mewajibkan kepala sekolah untuk mendapatkan sertifikat. Namun

praktiknya saat ini kepala sekolah yang mengikuti diklat mengeluarkan biaya sendiri. Direkomendasikan kepada mendikbud agar melakukan strategi komunikasi yang lebih efektif kepada pemangku jabatan di daerah, melalui sosialisasi, FGD ke Provinsi, Kabupaten, Kota mendorong pemda untuk mengalokasikan dana

4. pendidikan bagi kegiatan diklat kepala sekolah melalui APBD. Dengan demikian semua kepala sekolah dapat kesempatan untuk mengikuti diklat Penguatan Kepala Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solihin. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Edwards III, G. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D. C., USA: Congressional Quarterly. Guntur, Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- HP, Ismani. 2001. *Etika Birokrasi*. Malang: FIA Universitas Brawijaya.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Agenda Kebijakan Administrasi Negara*. Malang: FIA Unibraw.
- Iskandar, M. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. Ismail, M. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*.

Surabaya : Universitas Hang

Tuah. Leo, Agustino. 2008.

Dasar-Dasar Kebijakan

Publik. Bandung: Alfabeta.

Lubis, Suwardi. 1987. *Metodologi Penelitian Sosial*. Medan : USU Press.

Moleong, J Lexy. 1995. Metode

Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya. Nugroho, Riant. 2011.

Public Policy; Dinamika Kebijakan,

analisis Kebijakan,

Manajemen kebijakan. Jakarta:
Elekmedia Komputindo .

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks*

Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:

Grasindo Winarno, Bud. 2002. *Teori dan*

Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta :

Media

Pressindo.

Permendiknas nomor 28
tahun 2010.
Penugasan
Guru sebagai

KepalaSekolah/Madrasah. Jakarta:
Kemendikbud.

Permendikbud nomor 06 tahun 2018.

Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah.

Jakarta: Kemendikbud.

Ditjen GTK. 2018. *Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah*.

Jakarta:LPPKS

Ditjen GTK. 2018. *Petunjuk Teknis Pendidikan dan Pelatihan Penguatan*

KepalaSekolah. Jakarta:LPP

KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL TERHADAP TINDAKAN PENYEBARAN INFORMASI PALSU (DIGITAL LITERACY ABILITY ON THE SPREAD OF FALSE INFORMATION)

Eva Novaria (Carolina.eva1167@gmail.com), Efrilia (eviprabuagung@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui gambaran tenaga pendidik tentang tanggapan kemampuan literasi digital dalam menghadapi penyebaran informasi palsu. Media sosial menawarkan banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat termasuk kemudahan komunikasi, kemudahan mendapatkan informasi, kemudahan mengirim pesan atau dokumen. Akan tetapi, masyarakat sering menerima dampak buruk dari media sosial; salah satunya menerima informasi palsu. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan membagikan kuesioner kepada 19 responden tenaga pendidik di Provinsi Sumatera Selatan. Penulis menggunakan konsep Literasi Digital, khusus dimensi Perilaku Penyebaran Informasi Palsu, yang terdiri dari tiga dimensi. Hasil penelitian menunjukkan responden tenaga pendidik, rata-rata nilai 3, yang bermakna bermakna bahwa responden setuju dengan semua pernyataan yang menjadi indikator pada variabel perilaku penyebaran informasi palsu

Kata Kunci: Tingkat Literasi digital, Tindakan Penyebaran Informasi Palsu, tenaga pendidik

ABSTRACT

This study aims to find out the description of educators regarding the response of digital literacy skills in dealing with the spread of false information. Social media offers many benefits in people's lives including ease of communication, ease of getting information, ease of sending messages or documents. However, society often takes the brunt of social media; one of them received false information. This type of research used a descriptive qualitative method by distributing questionnaires to 19 respondents from teaching staff in South Sumatra Province. The author uses the concept of Digital Literacy, specifically the dimension of False Information Spreading Behavior, which consists of three dimensions. The results of the study show that the teaching staff respondents have an average score of 3, which means that the respondents agree with all statements which are indicators of the behavior variable for spreading false information.

Keywords: Digital Literacy Level, Acts of Spreading False Information, educators

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tahun 2024 mendatang menjelang Pemilu, mulai muncul informasi palsu, ujaran kebencian yang biasanya muncul saat pemilu, yang pada akhirnya dapat membuat masyarakat mengambil keputusan yang keliru. Informasi yang sehat seperti oksigen dalam demokrasi, sedangkan informasi palsu ibarat karbon dioksida dalam demokrasi.

Banyak terjadi pelanggaran norma Susila dalam masyarakat maya, pelanggaran norma seks dan pornografi dalam masyarakat maya terjadi dalam skala yang tidak dapat diatasi, baik melalui penutupan jaringan-jaringan seks dan pornografi. Kesulitan menutup jaringan-jaringan karena provider dan website secara langsung dan tidak langsung menghidupi diri mereka dan meraup keuntungan materi dengan situs-situs seks dan pornografi ini (Bungin, 2006).

Menurut (Kertanegara et al., 2020), Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1995 hingga 2010 merupakan generasi melek teknologi dan aktif dalam penggunaan internet. Generasi Z masuk kategori pribumi digital, mereka menerima media sosial sebagai sesuatu yang sudah biasa. (Mujiyanto & Nurhadi, 2022) Generasi Z akan memegang peranan penting dalam perkembangan Indonesia. Generasi Z yang mengakses media sosial dan internet harus memiliki pemahaman yang baik tentang literasi media. Banyaknya jenis informasi palsu yang muncul di media sosial membuat penggunaanya dituntut untuk melek media atau literasi media. Literasi Media merupakan kemampuan seseorang untuk mengakses, mengevaluasi secara kritis, dan membuat maupun memanipulasi media (Aufderheide & Firestone, 1993, hal. 5). Literasi media juga merupakan serangkaian perspektif yang digunakan secara aktif untuk menghadapi terpaan media, menginterpretasi, dan melakukan counter makna dari pesan media (Potter, Media Literacy 6th Edition, 2013, hal. 32-33).

Media sosial adalah alat komunikasi berbasis jaringan internet yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan membagi dan mengonsumsi informasi (Nations, 2020). Beberapa contoh platform media sosial yang paling banyak digunakan masyarakat diantaranya Facebook, WhatsApp, Instagram,

Twitter, dan berbagai jenis jejaring media sosial online lainnya. Berdasarkan data digital yang dirilis pada Januari 2020 oleh hootsuite dan wearesocial.org, sekitar 160 juta pengguna media sosial di Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 8.1 persen dari tahun sebelumnya. Youtube menjadi platform media sosial yang paling sering digunakan (88 persen), diikuti oleh Whatsapp, Facebook, dan Instagram (Kemp, 2020).

Kemajuan dalam teknologi digital membuat masyarakat dapat mengakses berbagai sumber informasi dengan cepat tanpa batas. Beragam Bentuk konten negatif berpotensi memicu konflik social, serta adanya ancaman kejahatan siber diruang digital seperti hoaks, penipuan daring, perjudian eksploitas seksual anak, perundungan siber, ujaran kebencian, hingga radikalisme atau terorisme berbasis digital (Intanny & Putra, 2019)

(Purwantoro et al., 2020) Literasi media berbasis digital memiliki hubungan positif yang cukup kuat dengan perilaku anti penyebaran hoaks. Besarnya kontribusi literasi media berbasis digital terhadap perilaku anti penyebaran hoaks ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi yang telah disesuaikan (R Square) sebesar 0,538 atau 53,8%, sedangkan sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Implikasi manajerial pada penelitian ini adalah pentingnya pembekalan kemampuan literasi media bagi siswa untuk menangkal hoaks. Siswa adalah garda terdepan untuk menangkal hoaks di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sehingga siswa perlu mendapatkan pelatihan pembekalan literasi media baik berbasis digital maupun non digital. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya literasi Literasi media berbasis digital memiliki hubungan positif yang cukup kuat dengan perilaku anti penyebaran hoaks. Besarnya kontribusi literasi media berbasis digital terhadap perilaku anti penyebaran hoaks ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi yang telah disesuaikan (R Square) sebesar 0,538 atau 53,8%, sedangkan sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Dari tinjauan penelitian sebelumnya dan fakta pada saat ini penulis termotivasi untuk meneliti hubungan kemampuan literasi digital

dengan tindakan penyebaran informasi palsu pada tenaga pendidik di Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran tenaga pendidik tentang tanggapan kemampuan literasi digital dalam menghadapi penyebaran informasi palsu.
2. Mengetahui dimensi respon penyebaran informasi palsu dari tenaga pendidik.

1. Tinjauan Literatur

Menurut (Abyan, 2020) bahwa instrument dan indikator literasi media sebagai tabel berikut :

Tabel 1. Instrumen dan indikator kemampuan literasi media

No	Instrumen	Indikator
1	2	3
1.	<i>Play</i>	Bisa mengakses dan mengeksplor media
2.	<i>Performance</i>	Dapat mempelajari hal baru yang di dapat dari media serta dapat mengimprovisasi informasi yang didapatkan dari media
3.	<i>Simulation</i>	Mampu mengenali kredibilitas informasi
4.	<i>Multitasking</i>	Mampu memindai informasi saat mengakses media , memetakan manfaat informasi saat mengakses media
5.	<i>Distributed cognition</i>	Mampu menyadari peran elemen-elemen dalam media serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

6	<i>Collective intelligence</i>	Mampu menyatukan pengetahuan yang didapat dari mengakses suatu media dan membandingkannya dengan pendapat orang lain untuk menuju tujuan bersama
7.	<i>Judgement</i>	Mampu mengenali kredibilitas sumber informasi
8.	<i>Transmedia navigation</i>	Mampu memburu informasi dari berbagai sumber dan membuat simulasi informasi (mengandaikan)
9.	<i>Networking</i>	Mampu mencari, mensintesis (menggabungkan) serta menyebarkan informasi yang didapat

Sumber: Tamburaka, 2013

Definisi ini menunjukkan bahwa literasi media adalah sesuatu yang lebih luas dari sekedar mengakses informasi, khalayak harus memiliki pemahaman kritis tentang media massa. Termasuk menguji teknis akses teknologi dan institusi dalam proses produksi media, mampu menganalisis secara kritis pesan media, dan mengenali peran yang dimainkan audiens dalam mengartikan pesan-pesan tersebut. Penelitian (Abyan 2020)

Hoax atau informasi palsu dibuat dengan berbagai tujuan, mulai dari untuk lelucon hingga untuk tujuan yang serius. Penyebaran hoax saat ini sangat cepat seiring dengan maraknya penggunaan media sosial di Indonesia. Hoax juga bisa diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. Tujuan dari hoax yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah, para spin doctor politik melihat efektivitas hoax sebagai

alat black campaign di pesta demokrasi yang mempengaruhi persepsi pemilih (Indonesia Mendidik, 2016).

Dimensi pertama adalah lingkungan yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku tertentu. Dimensi kedua adalah konsep diri, yang merupakan persepsi seseorang terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi seseorang dengan orang lain. Dimensi ketiga adalah tindakan, yaitu kesiapan merespon secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi (Kertanegara et al. 2020)

2. METODE PENELITIAN

(Kertanegara et al. 2020), Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala pengukurannya yang hasilnya akan menjadi data primer. Kuesioner adalah metode pengumpulan data menggunakan metode survey. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalnya dengan mengedarkan kuesioner (Sugiyono, 2009, hal. 6). Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, adalah dengan kuesioner tertutup. Untuk memperkuat data maka penelitian ini juga menggunakan referensi data sekunder. Responden berasal dari profesi tenaga pendidik, kuisisioner dibagikan dengan google form.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala Likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang objek atau fenomena tertentu. Pada penelitian ini jawaban responden berupa pilihan dari empat alternatif yang ada, yaitu Tidak Setuju, Kurang Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Persepsi Responden tentang Penyebaran Informasi Palsu

No	Alternatif Jawaban							
	Indikator	T S	K S	S	SS	Tota l	Rata -rata	K et

1.	Dimensi Konsep Diri	1	4	72	120	197	66	
2.	Dimensi Lingkungan	2	16	54	36	108	54	
3.	Dimensi Tindakan	3	8	93	88	192	64	
	Total					497		
	Rata-rata						3	S e t u j u

Sumber, hasil olah data, 2023

Keterangan :

1 = Tidak Setuju (TS), 2= Kurang Setuju (KS), 3 = Setuju (S), 4= Sangat Setuju (SS)

Data yang diperoleh nilai persepsi untuk Dimensi Konsep diri dari responden nilainya 197, dan Total Dimensi Tindakan 192, bermakna bahwa responden mengetahui pengertian informasi palsu, memeriksa keaslian data, dan mengetahui dampak penyebaran informasi palsu. Dari dimensi Tindakan nilai total 192, bermakna bahwa responden merasa tidak nyaman mendapat informasi palsu, menegur orang yang menyebarkan informasi palsu, dan responden telah melindungi diri dari informasi palsu dengan cara melakukan evaluasi apakah informasi tersebut dapat diverifikasi di tempat lain, dan tujuan penyebaran informasi palsu tersebut.

Data responden menyatakan 26,3 persen, menggunakan Instagram, WA, Facebook dan lain-lain, 15,8 persen responden menggunakan Facebook saja. Sementara responden menjawab penggunaan internet sehari semalam

Tabel.3. Durasi Penggunaan Internet Responden

No	Jam Penggunaan Internet	Total (persen)
1	5 jam	47,5 %
2.	6 – 8 jam	31,7 %
3.	12 – 14 jam	20,8 %

Data responden dalam penggunaan internet terbanyak 5 jam sehari sebanyak 47,5 persen, dan persentase lama penggunaan internet yang sedikit adalah 12 sampai dengan 14 jam sehari sebanyak 20,8 persen.

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa persepsi responden mengenai perilaku penyebaran informasi palsu yang terdiri dari konsep diri, lingkungan, dan Tindakan adalah setuju. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata skor sebesar 3, bermakna bahwa responden setuju dengan semua pernyataan yang menjadi indikator pada variabel perilaku penyebaran informasi palsu.

Pernyataan ini mendukung penelitian yang (Kertanegara et al., 2020) dilakukan bahwa terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara tingkat literasi media terhadap perilaku penyebaran hoax di kalangan generasi Z. Faktor tingkat literasi digital dapat menjelaskan atau memiliki peran sebesar 35.7 persen terhadap perilaku penyebaran hoax. Dimensi yang kuat dari literasi media adalah Analisis dan Evaluasi, sedangkan dimensi yang paling kuat dari perilaku penyebaran informasi palsu adalah konsep diri.

Menurut (Intanny & Putra, 2019), Perlakuan berupa pelatihan yang diberikan kepada pegawai humas daerah, telah mampu memberikan peningkatan pada tujuh dari sepuluh indikator literasi media sosial yang diujikan. Indikator consuming skill, prosuming skill, dan distribution yang merupakan indikator yang bersifat teknis dan melibatkan alat bantu dan teknologi, tidak menunjukkan

peningkatan yang signifikan dalam keterampilan literasi media sosial.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa tingkat literasi media sosial tidak berhubungan langsung dengan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Metode penyampaian verbal juga ditemukan sebagai kelemahan dari perlakuan sekaligus penyebab ketiga indikator pada dimensi fungsional bernilai negatif. Penyampaian materi teknis seharusnya disertai dengan praktik langsung oleh peserta karena banyak berkaitan dengan keterampilan teknis yang melibatkan penggunaan alat bantu dan teknologi.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Mujianto & Nurhadi, 2022), terdapat pengaruh literasi media social terhadap penerimaan informasi palsu sebesar 0,204, yang artinya persentase kontribusi variabel literasi media berpengaruh terhadap penerimaan informasi palsu sebesar 20,4%, sedangkan sisanya 79,6% dipengaruhi oleh variabel eksternal (Nahdiana dan Adysa 2020). Kemampuan literasi media dinilai ampuh sebagai kemampuan untuk menangkal hoaks. Perlu digiatkan program pembekalan atau pelatihan literasi media bagi siswa di sekolah secara berkala. Dalam program ini, siswa dilatih untuk membaca informasi yang diterima di media hingga tuntas. Siswa mesti dilatih untuk memindai unsur 5W+1H (siapa, dimana, kenapa, kapan, apa, bagaimana) dari informasi yang didapat dari media sosial. Siswa diharapkan dapat membandingkan informasi yang diterima dengan informasi yang didapat dari media lain (surat kabar, televisi, radio, atau berita online) untuk memeriksa keaslian berita. Program pembekalan literasi media bagi siswa di sekolah juga diharapkan dapat memperbaiki perilaku siswa dalam menghadapi informasi palsu.

Menurut Febliza (Febliza & Okatariyani, 2020) , Budaya Literasi Digital yang masih rendah pada pegawai pemerintah

Hasil penelitian Novaria dan Habiby 2021, bahwa dimensi ability to find and select information nilainya 60 persen yang bermakna

bahwa pegawai pemerintah di lingkungan BPSDMD Sumatera Selatan memiliki kemampuan mencari data dan menyeleksi informasi yang akan digunakan dapat dipercaya dan jelas sumbernya. Di sisi lain, dimensi critical consuming menunjukkan hasil yang berbeda. Dimensi ini mbernya (Rianto & Sukmawati, 2021)

(Mujiyanto & Nurhadi, 2022) Literasi media berbasis digital memiliki hubungan positif yang cukup kuat dengan perilaku anti penyebaran hoaks. Besarnya kontribusi literasi media berbasis digital terhadap perilaku anti penyebaran hoaks ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi yang telah disesuaikan (R Square) sebesar 0,538 atau 53,8%, sedangkan sisanya sebesar 46,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Implikasi manajerial pada penelitian ini adalah pentingnya pembekalan kemampuan literasi media bagi siswa untuk menangkal hoaks. Siswa merupakan garda terdepan untuk menangkal hoaks di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sehingga siswa perlu mendapatkan pelatihan pembekalan literasi media baik berbasis digital maupun non digital. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya literasi media dan hoaks.

4. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait kemampuan literasi digital responden terhadap tindakan penyebaran informasi palsu, media dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku penyebaran informasi palsu. Hasil analisis responden tenaga pendidik, rata-rata nilai 3, yang bermakna bermakna bahwa responden setuju dengan semua pernyataan yang menjadi indikator pada variabel perilaku penyebaran informasi palsu.

Penelitian ini dapat menjadi masukan juga untuk pemerintah agar lebih meningkatkan kembali kesadaran untuk membaca informasi yang penting tidak hanya bagi diri mereka pribadi.

SARAN

Saran penulis untuk melakukan penelitian pada siswa, atau para pejabat struktural pemerintah dan dapat digunakan dimensi tingkat literasi media atau indikator lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, G. S. (2020). Media Literacy Strategies of Mahasantri Gontor 2 in Preventing the Issue of Hoax. *SAHAFA: Journal of Islamic Communication*, 2(2), 155–166.
- Bungin, Burhan. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Kencana Prenada Media Grup.
- Febaliza, A., & Okatariyani, O. (2020). Pengembangan Instrumen Literasi Digital Sekolah, Siswa Dan Guru. *Jurnal Pendidikan Kimia Universitas Riau*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.33578/jpk-unri.v5i1.7776>
- Intanny, V. A., & Putra, N. A. (2019). Studi Eksperimen Peningkatan Literasi Media Sosial Humas Pemerintah Daerah (Experimental Study to Improve Social Media Literacy For Local Government Public Relations). *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 21(2), 109. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.2019.109-122>
- Kertanegara, M. R., Nabila, A., Nanda Berlian, C., Jeaniffer, E., Dwi, F., Sabrina, I., Srengseng Sawah, J., Jakarta Selatan, K., Jakarta, D., Paralel Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jl Gatot Subroto NoKav, K., & Prapatan, M. (2020). Pengaruh Tingkat Literasi Media terhadap Perilaku Penyebaran Hoax di Kalangan Generasi Z (Studi pada Siswa SMA Negeri 4 Depok) The Effect of Media Literacy Level on the Behavior of Hoax Spread among Generation Z (Study of SMA Negeri 4 Depok Students). *Jurnal Kovergens*, 2(1), 80–161.
- Mujiyanto, H., & Nurhadi, Z. F. (2022). Dampak Literasi Media Berbasis Digital Terhadap Perilaku Anti Penyebaran Hoaks. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 21(1), 31.

<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6419>

Purwantoro, S. A. D. I., Syahardani, R., Hermawan, E., & Kuvaeni, A. (2020). Media Sosial : Peran Dan Kiprah Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Social Media : Role and Gait in the Development of National Insights. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(4), 55–79.

Rianto, P. &, & Sukmawati, A. I. (2021). Literasi Digital Pelajar Di Yogyakarta : Dari. *Jurnal Komunikasi Global*, 10(1), 137–159.

Wibisono, G. 2017. Media Baru dan Nasionalisme Anak Muda: Pengaruh Penggunaan Media

Sosial Good New From Indonesia' terhadap Perilaku Nasionalisme. *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 6 No. 279 Volume 9 No 4

GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK

M. Sतालhis, Widyaaiswara Ahli Madya,
email: talhis234@gmail.com. Hp.081273067738

ABSTRAK

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi kepada setiap warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, sehingga efektifitas sistem pemerintahan dalam pelayanan public dapat diwujudkan.

Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota). Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum utamanya melalui pelayanan public yang dilakukan.

Faktor-faktor penyebab tidak berfungsinya pelayanan publik, yaitu: Masalah struktur birokrasi yang berkaitan dengan penganggaran pelayanan public. Budaya birokrasi mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Selain itu, terdapat faktor perilaku atau sikap mental PNS yang tidak mencerminkan perilaku melayani, tetapi sebaliknya menunjukkan keinginan untuk dilayani. Keadaan birokrasi Indonesia saat ini tidak lagi memenuhi persyaratan organisasi yang baru. Hal ini bisa dilihat dari pengelolaan birokrasi dari tertinggi sampai terendah lebih mengutamakan input dan proses daripada hasil. Itu sebabnya para birokrat selalu berhati-hati agar tidak ada sisa anggaran di akhir tahun.

Kata Kunci: *good governance*, pelayanan public.

I. Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Saat ini masyarakat di negara kita mengharapkan pemerintah mampu menerapkan good governance yaitu, pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Efektif artinya pelaksanaannya terarah sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, efisien artinya penggunaan sumber daya seminimal mungkin, transparan artinya segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat transparan, siapa saja dapat melakukan pengawasan langsung sehingga dapat memberikan penilaian terhadap hasil yang dicapai, akuntabilitas berarti lembaga negara bertanggung jawab atas kebijakan yang ditetapkan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada semua warga negara pada akhir tahun.

Permasalahan bangsa Indonesia saat ini semakin kompleks, adanya good governance hingga saat ini memang masih menjadi harapan yang belum terwujud. Ada kecenderungan praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih jauh dari harapan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian utama. Transparansi memang bisa menjadi salah satu solusi, namun tidak cukup untuk mewujudkan good governance.

Konsep good governance bermula dari ketidakpuasan terhadap tindakan pemerintah yang dipercayakan untuk mengelola urusan publik. Pelaksanaan good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar

Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Masyarakat sebagai klien yang membutuhkan bantuan aparat birokrasi, sehingga harus tunduk pada aturan birokrasi dan kehendak aparat. Hal ini karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukanlah budaya pelayanan, melainkan budaya kekuasaan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka harus dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkesinambungan untuk menjamin pelayanan publik yang setinggi-tingginya, karena pelayanan publik merupakan fungsi utama negara yang dilaksanakan oleh

pejabat publik dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance yang harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri good governance. Oleh karena itu, aparatur negara harus memenuhi tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif, dimana penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

I.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pelayanan publik yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Kurang tanggap terhadap berbagai keluhan.
Aspirasi dan harapan masyarakat, sering dijawab dengan lamban atau bahkan diabaikan.
- b. Kurang informative.
Informasi yang berbeda disampaikan kepada masyarakat lambat atau tidak sampai sama sekali.
- c. Inefisiensi.
Persyaratan berbeda yang diperlukan seringkali tidak terkait dengan layanan yang ditawarkan.
- d. Birokrasi, pelayanan biasanya dilaksanakan melalui proses berjenjang sehingga pelayanan menjadi lama.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis dapat mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik ?
2. Bagaimana konsep good governance muncul dalam kaitannya dengan pelayanan publik?
3. Bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat memuaskan masyarakat?

I.3. Tujuan

- a. Menjelaskan penerapan prinsip good

governance dalam pelayanan publik.

- b. Menjelaskan perwujudan konsep good governance dalam kaitannya dengan pelayanan publik.
- c. Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat memuaskan masyarakat.

II. Kajian Pustaka

2.1. Pengertian *Good governance*

Penerapan prinsip good governance sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi aparatur negara. Hal ini dikarenakan pemerintah membentuk konsep prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sehingga dapat memperbesar kemungkinan-kemungkinan perubahan birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi masih lambat, tidak profesional, dan Ciri-ciri buruk birokrasi adalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga, sistem, metode dan cara kerja yang masih belum tertata, PNS belum profesional, netral, korupsi, persekongkolan dan nepotisme masih melekat, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program tidak terkendali dan disiplin serta moral aparatur negara masih rendah.

Good governance, menurut Sadjijono (2007:203), berarti: "Kegiatan lembaga negara, yang berlangsung dalam mewujudkan kepentingan rakyat dan cita-cita negara berdasarkan standar yang berlaku". Namun menurut IAN dan BPKP (2005:5), good governance berarti: "Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya pembangunan". Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan pengertian good governance adalah : asas profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh semua; orang."

Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang baik mengacu pada berfungsinya lembaga negara yang didasarkan pada kepentingan rakyat dan standar untuk mewujudkan cita-cita Negara. Hal ini diatur di berbagai tingkat negara, terkait dengan sumber daya sosial-budaya, politik dan ekonomi.

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan adalah: "Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat". Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga, di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Namun untuk ringkasnya, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

2.2. Konsep Dasar *Good governance*

Konsep good governance sebenarnya sudah lama diterapkan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, masih banyak yang bingung dengan konsep governance. Sederhananya, banyak partai politik mengartikan tata kelola sebagai pemerintahan.

Governance disini bukan hanya tentang struktur dan tata kelola lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah satu dari tiga aktor utama yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lainnya adalah sektor swasta dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, memahami tata kelola berarti memahami bagaimana peran diintegrasikan ke dalam aturan main yang disepakati bersama antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Institusi negara harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam meningkatkan kegiatan ekonomi yang meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan, sedangkan masyarakat sipil harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik, termasuk bagaimana memantau perkembangan kegiatan tersebut.

Suatu pemerintahan dikatakan memiliki kualitas yang baik jika memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.

2.3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik adalah:

- a. Profesionalisme, meningkatkan keterampilan dan moral administrasi publik untuk memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, tepat dan terjangkau.
- b. Tanggung jawab, meningkatkan tanggung jawab pengambil keputusan di semua bidang kepentingan publik.
- c. Transparansi, membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi dan memfasilitasi akses informasi yang benar dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi prosedur yang baik, kejelasan harga, ketepatan, keterjangkauan, keutuhan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga negara menggunakan haknya untuk menyatakan pendapatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- f. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh semua orang, tanpa kecuali, terselenggaranya perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, menghormati hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip *good governance*, yaitu::

- a. Wawasan ke depan (visionary);
- b. Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency);
- c. Partisipasi masyarakat (participation);
- d. Tanggung gugat (accountability);
- e. Supremasi hukum (rule of law)
- f. Demokrasi (democracy);
- g. Profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and competency);
- h. Daya tanggap (responsiveness);
- i. Keefisienan dan keefektivan (efficiency and effectiveness);
- j. Desentralisasi (decentralization)
- k. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil society partnership);
- l. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality);
- m. Komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection);
- n. Komitmen pasar yang fair (commitment to fair market).

Empat belas prinsip tata kelola yang baik dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- a. Manajemen berwawasan ke depan (strategic vision), semua kegiatan pemerintahan di berbagai sektor dan tingkatan harus dilandasi oleh visi dan misi yang jelas dan kerangka waktu untuk mencapainya, serta dilengkapi dengan strategi pelaksanaan yang terarah dan bermanfaat. dan berkelanjutan.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka (transparan), perwujudan yang jelas dari asas ini dapat dilihat antara lain ketika masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengetahui dan menerima informasi dan informasi tentang kebijakan, program dan

kegiatan aparatur pemerintahan, baik yang dilaksanakan di pemerintah pusat dan di tingkat daerah.

- c. Manajemen partisipatif, masyarakat yang berkepentingan berpartisipasi dalam perancangan dan/atau pengambilan keputusan kebijakan publik untuk masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat luas.
- d. Manajemen yang bertanggung jawab /bertanggung jawab (responsible), badan pemerintah dan perangkatnya harus dapat bertanggung jawab atas pemenuhan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan tugasnya. Demikian pula, kebijakan, program, dan tindakan yang diterapkan dapat dipertimbangkan.
- e. Administrasi sesuai dengan asas negara hukum, ungkapan konkrit dari asas ini meliputi upaya penyelesaian kasus KKN dan pelanggaran hak asasi manusia, kesadaran hak asasi manusia, kesadaran hukum dan pembinaan budaya hukum. Upaya ini tunduk pada aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas serta tidak tunduk pada manipulasi politik.
- f. Penyelenggaraannya bersifat demokratis dan berwawasan konsensus, perumusan kebijakan pembangunan di pusat dan daerah dilakukan melalui mekanisme yang demokratis dan tidak semata-mata ditentukan oleh kekuasaan eksekutif. Keputusan antara eksekutif dan parlemen harus disepakati agar setiap kebijakan publik menjadi keputusan bersama yang sesungguhnya.
- g. Manajemen berdasarkan profesionalisme dan kompetensi, wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat pada evaluasi dan penilaian kebutuhan staf yang ada pada tingkat kompetensi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- h. Manajemen bersifat (responsif), pejabat publik harus bereaksi terhadap situasi/keadaan yang berubah untuk merespon keinginan masyarakat dan mengambil inisiatif untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

- i. Pengelolaan dengan menggunakan struktur dan sumber daya secara efektif dan efisien. Pemerintah pusat dan daerah harus selalu mengevaluasi terhadap struktur yang ada dari waktu ke waktu, melakukan perbaikan struktur sesuai kebutuhan yang berubah, seperti menata ulang struktur kelembagaan secara umum, menambah tugas dan fungsi secara tepat dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya keuangan dan lainnya yang tersedia secara efektif dan efisien.
- j. Desentralisasi administrasi, pelimpahan tugas dan wewenang dari pusat kepada seluruh jajaran aparatur untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menjamin keberhasilan pembangunan di pusat dan daerah.
- k. Kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat, tata kelola yang mendorong pembangunan masyarakat madani dan swasta harus diperkuat dengan menciptakan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menghambat terciptanya kemitraan yang setara harus segera disingkirkan dengan memperbaiki sistem pelayanan sektor publik dan swasta serta melaksanakan pelayanan terpadu.
- l. Suatu pemerintahan yang berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan, mengurangi ketimpangan di berbagai tempat dan antara pusat dengan daerah dan antar daerah secara adil dan proporsional, merupakan bukti nyata prinsip pengurangan ketimpangan. Termasuk juga upaya untuk menciptakan keadilan dan mengurangi perlakuan diskriminatif diferensial yang menimbulkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.
- m. Manajemen berkomitmen terhadap lingkungan, daya dukung lingkungan menjadi lemah akibat penggunaan yang tidak terkendali. Contoh kewajiban

lingkungan adalah kewajiban menyiapkan analisis dampak lingkungan yang konsisten, mengawasi pemeriksaan peraturan lingkungan secara konsisten, mengaktifkan lembaga pengendalian dampak lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

- n. Untuk administrasi yang berorientasi pasar, pengalaman menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan, yang pada akhirnya membebani anggaran dan bahkan merusak pasar. Upaya menghubungkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam maupun antar daerah adalah contoh bukti nyata keterlibatan pasar. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan membutuhkan good governance. Namun, situasi saat ini menunjukkan masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kekuasaan dan kurangnya kejujuran dan transparansi adalah beberapa masalah yang menyebabkan pemerintahan yang baik masih gagal. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diikuti di beberapa lembaga pemerintahan yang penting. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tiga pilar yaitu. negara, sector swasta dan civil society, harus saling menjaga, saling mendukung dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.

2.4. Pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia

Penerapan good governance di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua hal yang sangat mendasar:

- a. Persyaratan eksternal: pengaruh globalisasi memaksa kita untuk menerapkan good governance. Konsep “good governance” mulai muncul di Indonesia pada akhir tahun 1990 an, sesuai dengan komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan organisasi asing dan donor, yang menekankan pada kondisi objektif suatu bangsa.

- b. Tuntutan internal: Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya *abuse of power* yang terwujud dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan sudah sedemikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2.5. Pengertian Pelayanan Publik

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia, yaitu:

- a. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi.
- b. Pelayanan publik adalah ranah di mana berbagai aspek *clean dan good governance* dapat diartikulasikan secara mudah.
- c. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Menurut Robert (1996:30) yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban”.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat

2.6. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Menurut Bharata (200 :11), unsur penting dalam proses pelayanan publik yaitu:

- a. Penyedia layanan, misal pihak yang dapat memberikan kepada konsumen suatu jasa tertentu atau sebagai jasa berupa barang (goods) atau jasa (services).
- b. Penerima layanan, misal konsumen (pelanggan) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada individu yang membutuhkan layanan tersebut.
- d. Kepuasan pelanggan, Saat menawarkan layanan, penyedia layanan harus melanjutkan dari tujuan utama layanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting karena kepuasan pelanggan biasanya sangat erat kaitannya dengan standar kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada mereka.

Menurut Kasmir (2006:3), ciri pelayanan publik yang baik meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tersedianya karyawan yang baik;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik;
- c. Tanggung jawab untuk setiap klien (s) dari awal sampai akhir;
- d. Dapat melayani dengan cepat dan akurat;
- e. Komunikatif;
- f. Menjamin kerahasiaan setiap transaksi;
- g. Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik;
- h. Memahami kebutuhan klien (pelanggan)
- i. Dapat memberikan kepercayaan pelanggan (nasabah)

2.7. Asas-asas Pelayanan Publik

Menurut Ratminto dan Winarsih (2006:2 5), ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dan perizinan pelayanan pemerintah, yaitu:

- a. Empati untuk pelanggan. Personil perizinan dari instansi yang memberikan pelayanan perizinan harus mampu berempati kepada masyarakat pengguna layanan.
- b. Pembatasan prosedur. Prosedur harus direncanakan sesingkat mungkin, sehingga konsep satu titik pelayanan benar-benar menjadi kenyataan.
- c. Kejelasan prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan harus dirancang sesederhana mungkin dan masyarakat pengguna layanan harus diinformasikan.
- d. Minimalkan persyaratan layanan. Persyaratan manajemen layanan harus

dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.

- e. Kejelasan otorisasi. Kewenangan pejabat pelayanan publik pengguna layanan harus dirumuskan se jelas mungkin dengan menyusun tabel tugas dan wewenang.
- f. Transparansi biaya. Biaya layanan harus serendah dan setransparan mungkin.
- g. Kepastian jadwal dan durasi layanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus dipastikan, agar masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak khawatir.
- h. Minimalkan formulir. Bentuk harus dirancang secara efektif untuk membuat bentuk gabungan (satu bentuk yang dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda). saya.
- i. Memaksimalkan masa berlaku lisensi. Agar masyarakat tidak terlalu sering mengkhawatirkan izin, masa berlaku izin harus selama mungkin. jam.
- j. Menjelaskan hak dan kewajiban penyedia jasa dan pelanggan. Hak dan kewajiban penyedia layanan dan pelanggan harus didefinisikan dengan jelas dan mencakup sanksi dan kompensasi.
- k. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik harus menghindari keluhan bila memungkinkan. Namun, jika keluhan memang muncul, harus ada mekanisme yang memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani secara efektif sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik

2.8. Prinsip Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memenuhi dan sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pelayanan yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sekurang-kurangnya memuat bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Kesederhanaan dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

- b. Kejelasan, kejelasan ini meliputi kejelasan dalam aspek-aspek sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik;
 - 2) Satuan kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan pengaduan/masalah/perselisihan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - 3) Informasi tentang biaya pelayanan publik dan tata cara pembayarannya.
- c. Ketepatan waktu, misal penyelenggaraan pelayanan publik harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- d. Accuracy, produk pelayanan publik diterima dengan benar, akurat dan legal.
- e. Keamanan, proses dan pelayanan publik menciptakan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat terpilih bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian pengaduan / permasalahan yang timbul akibat penyelenggaraan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan ruang dan prasarana kerja yang layak, alat kerja dan jasa pendukung lainnya, termasuk penyediaan telekomunikasi dan teknologi informasi (telematika).
- h. Aksesibilitas artinya lokasi serta fasilitas pelayanan yang memadai dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan dapat menggunakan teknologi telekomunikasi informasi.
- i. Disiplin, sopan santun dan kebaikan, penyedia layanan harus disiplin, sopan dan santun, baik hati dan melayani dengan tulus.
- j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, ruang tunggu harus memiliki lingkungan yang nyaman, bersih, tertib, asri dan sehat

serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti tempat parkir, toilet dan tempat ibadah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. terhadap kebutuhan masyarakat. prinsip pelayanan.

2.9. Kaitan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik

Pelaksanaan *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Upaya untuk menghubungkan *good governance* dengan pelayanan publik bukanlah hal baru.

Namun demikian, keterkaitan antara konsep *good governance* dan pelayanan publik cukup jelas. Argumen lain yang membuktikan pentingnya pelayanan publik adalah kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini nampak jelas terlihat karena di negara berkembang kesadaran birokrat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat masih sangat lemah.

Secara umum permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi birokrasi tidak berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- b. Kompleksitas masalah yang tinggi dalam menemukan solusi yang tepat;
- c. Penyalahgunaan wewenang, praktik KKN marak, dan pengawasan kinerja aparatur lemah;
- d. Tuntutan partisipasi publik dalam kebijakan publik semakin meningkat;
- e. Tuntutan yang semakin besar terhadap penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kegiatan publik serta kepatuhan terhadap hukum;

- f. Mengingat perlunya pendelegasian tanggung jawab, wewenang dan pengambilan keputusan pada era desentralisasi;
- g. Lemahnya kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan, sistem kelembagaan (organisasi) dan tata laksana pemerintahan daerah yang belum memadai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, birokrat bekerja dalam lingkungan nilai, dimana nilai-nilai tersebut menjadi dasar dari seluruh aktivitas birokrasi dalam pemberian pelayanan publik. Terkait dengan pernyataan tersebut, ada beberapa nilai yang harus dipatuhi oleh formulator ketika membuat maklumat pelayanan: kesetaraan, keadilan, transparansi, konsistensi dan regulasi, partisipasi, inovasi dan peningkatan, efisiensi, efektivitas.

Dengan metode tersebut, penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000. Salah satu alasan mengapa pelayanan publik bersifat strategis dan terfokus adalah Kenyataan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih belum baik dan ini mengindikasikan kinerja manajemen pemerintahan yang kurang baik.

Faktor-faktor penyebab buruknya pelayanan publik selama ini antara lain:

- a. Kebijakan dan keputusan yang cenderung menguntungkan para elit politik dan sama sekali tidak pro rakyat.
- b. Kelembagaan yang dibangun selalu menekankan sekedar teknis-mekanis saja dan bukan pendekatan pada martabat manusia.
- c. Kecenderungan masyarakat yang mempertahankan sikap nrimo (pasrah) apa adanya yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga berdampak pada sikap kritis masyarakat yang tumpul.
- d. Adanya sikap-sikap pemerintah yang berkecenderungan mengedepankan informalitas birokrasi dan mengalahkan proses formalnya dengan asas mendapatkan keuntungan pribadi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan paradigma tata pemerintahan yang baik (good governance), dalam proses tidak hanya pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule of government (legalitas), atau hanya untuk kepentingan pemerintah daerah. Paradigma good governance menghadirkan proses dan prosedur di mana perencanaan, desain dan perumusan kebijakan selalu menghadirkan kebersamaan dan implementasi oleh semua kelompok kepentingan.

Good governance pada hakikatnya memerlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, baik di birokrasi maupun di masyarakat. Penyelenggaraan good governance adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan pelayanan harus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hakikat pemerintahan yang baik (good governance) adalah penyediaan pelayanan publik yang baik, yang sejalan dengan sifat desentralisasi dan otonomi daerah dengan kebijakan yang dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola masyarakat setempat dan meningkatkan pelayanan publik.

Kinerja pemerintah yang buruk dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor antara lain: ketidakpedulian dan kurangnya komitmen manajer puncak, manajemen tingkat atas, menengah dan bawah dan mesin pemerintah lainnya, kerjasama untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Selanjutnya Kurangnya komitmen terhadap strategi dan kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan Kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik mengurangi atau membatasi KKN dan

pungutan liar yang ada saat ini di semua bidang pelayanan publik dan dapat menghapuskan diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Paradigma good governance menjadi penting dan menggerakkan pelayanan publik di era otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan, perubahan pengelolaan, sikap mental, perilaku aparatur pelayanan dan meningkatkan kesadaran dan komitmen pengelola daerah dan pegawainya untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.2. Permasalahan Pelayanan Publik

Masalah pokok pelayanan publik pada hakekatnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada beberapa aspek seperti model pelaksanaan (tata laksana), dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Berdasarkan model pelaksanaan -nya, pelayanan publik masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi hampir di semua level elemen pelayanan, mulai dari level petugas pelayanan (garis depan) hingga level instansi yang bertanggung jawab. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi dan harapan masyarakat seringkali lamban atau diabaikan begitu saja.
- b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau tidak sampai kepada masyarakat.
- c. Kurang aksesibel. Berbagai unit pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat sehingga mempersulit mereka yang membutuhkan pelayanan.
- d. Kurang koordinasi. Berbagai unit layanan yang saling terkait kurang terkoordinasi. Akibatnya, kebijakan seringkali tumpang tindih atau bertentangan antara satu instansi dengan instansi terkait lainnya.
- e. Birokrasi. Layanan (terutama layanan perizinan) biasanya diimplementasikan melalui proses bertingkat, sehingga

layanan memakan waktu terlalu lama untuk diselesaikan.

- f. Kurang mau mendengarkan keluhan/saran/permintaan masyarakat. Umumnya petugas pelayanan tidak mau mendengarkan keluhan/saran/permintaan dari masyarakat. Akibatnya, Layanan disediakan apa adanya, tanpa perbaikan dari waktu ke waktu.
- g. In efisien Berbagai persyaratan yang dibutuhkan (khususnya untuk pelayanan perijinan) seringkali tidak berkaitan dengan pelayanan yang ditawarkan.

Dari sisi SDM kelemahan menyangkut profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Sudut pandang yang berbeda juga sepakat bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang layak.

Dari segi kelembagaan, kelemahan terbesar adalah struktur organisasi yang tidak dirancang khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan tidak praktis (birokratis) dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk menjalankan dua fungsi sekaligus, regulasi dan administratif, sebagian besar masih menjadi tanggung jawab negara, yang juga menyebabkan inefisiensi dalam pelayanan publik.

3.3. Pemecahan masalah

Pada masa reformasi, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas semakin meningkat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengatasi permasalahan di atas sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang memuaskan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengatasi masalah ini, direkomendasikan:

- a. Penetapan standar layanan. Standar pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar layanan adalah kewajiban penyedia layanan untuk menyediakan layanan dengan kualitas tertentu, ditentukan oleh kombinasi harapan

masyarakat dan kemampuan penyedia layanan. Standar layanan ditentukan oleh identifikasi jenis layanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi layanan, proses dan metode operasional, wilayah dan infrastruktur, analisis waktu dan biaya layanan. Proses ini tidak hanya menginformasikan standar pelayanan yang akan ditetapkan, tetapi juga menginformasikan lembaga yang dapat mendukung pelaksanaan proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai standar yang ditentukan.

- b. Pengembangan Standard Operating Procedure (SOP). SOP diperlukan untuk menjamin kelangsungan proses pelayanan. Dengan bantuan SOP, maka pengolahan yang dilakukan secara internal di unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas untuk bekerja secara konsisten. Selain itu, SOP juga berguna dalam hal-hal berikut:

- 1) Agar proses berjalan lancar. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalnya petugas yang menangani proses tertentu tidak dapat hadir, petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu, proses pelayanan dapat dilanjutkan;
- 2) Memastikan penyelenggaraan layanan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Memberikan informasi yang akurat dalam melacak kesalahan operasional, jika terdapat penyimpangan dalam pelayanan;
- 4) untuk memberikan informasi yang akurat ketika ada perubahan tertentu dalam prosedur penyediaan layanan;
- 5) Memberikan informasi yang jelas tentang tugas dan wewenang yang diberikan kepada pegawai yang memimpin proses pelayanan tertentu, yaitu. bahwa semua pegawai yang berpartisipasi dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas;

- c. Mengembangkan survei kepuasan pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, perlu dikembangkan

mekanisme penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat tercapai jika pelayanan yang ditawarkan oleh penyedia jasa memenuhi kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, survei kepuasan pelanggan memegang peranan penting dalam peningkatan pelayanan publik.

- d. Pengembangan sistem penanganan pengaduan. Pengaduan masyarakat menjadi sumber informasi bagi upaya penyedia layanan untuk menjaga konsistensi penyampaian layanan pada standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlu dibangun suatu sistem pengelolaan pengaduan yang dapat menangani berbagai pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga harus didukung dengan restrukturisasi birokrasi yang mengurangi kompleksitas pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Birokrasi yang kompleks merupakan sarana tumbuhnya KKN. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa peningkatan kinerja pelayanan publik di Indonesia memerlukan kebijakan yang komprehensif. Pemerintah membutuhkan keberanian dan keterampilan untuk mengembangkan dan secara konsisten melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif. Dengan demikian diharapkan reformasi birokrasi Indonesia dapat menumbuhkan birokrat yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kepentingan publik dan memberikan pelayanan publik yang efisien, responsif dan bertanggung jawab. Kedepan diharapkan pelayanan yang diberikan dengan konsep *good governance* dapat mempermudah dalam pemberian pelayanan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pihak yang berwenang serta tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, tiga pilar yaitu, negara, *private sector* dan *civil society*, saling menjaga, mendukung dan berpartisipasi aktif dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan Dan saran

4.1. Kesimpulan

- a) Tata pemerintahan yang baik pada hakekatnya memerlukan partisipasi seluruh pemangku kepentingan yang dekat dengan masyarakat, baik birokrasi maupun swasta, dan pemberian pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Esensi tata pemerintahan yang baik adalah penyediaan pelayanan publik yang baik sesuai dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengatur, mengelola, dan memajukan masyarakat lokal. pelayanan publik
- c. Terselenggaranya pelayanan publik yang baik merupakan tanda peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, di satu sisi terjadi perubahan cara berpikir yang lebih baik mempengaruhi perubahan sikap mental dan perilaku pejabat penyelenggara pelayanan publik. . melayani) Sektor pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui lima cara: implementasi UU Pelayanan Publik yang baik, pembentukan clearing house pelayanan publik, transparansi biaya pengelolaan pelayanan publik, penyusunan SOP, dan reformasi pegawai pelayanan publik.

2. Rekomendasi

Birokrasi Indonesia gagal memberikan pelayanan publik yang efisien, adil, responsif dan akuntabel. Fakta ini sangat memprihatinkan, maka ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

- a. Nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan etika PNS harus diteguhkan atau ditularkan dalam perilaku terbaik dan di lingkungan terdekat. Karena sebaik apapun perencanaan pelayanan publik, tidak akan terlaksana secara efisien, efektif dan ekonomis jika dilakukan oleh orang-orang yang memiliki integritas dan nilai etika yang rendah.
- b. Memperkuat partisipasi masyarakat sipil
- c. Sistem pelayanan publik harus disusun dengan memasukkan nilai budaya keterbukaan,

misalnya dengan menerapkan konsep piagam warga melalui partisipasi masyarakat.

- d. Kegiatan sosialisasi ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, yang pada akhirnya akan mempercepat tumbuhnya semangat partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barata, Atep, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, 2003, Jakarta: Gramedia.
- , 2004. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- , 2003, *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan? Policy Brief*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Dwiyanto, Agus, dkk., *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, 2006. Yogyakarta: UGM Press.
- IAN & BPKP, *Pelayanan Publik* . 2000, Malang: CV Citra Malang.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. 2000. , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara ,*Penyusunan Standar Pelayanan Publik* , 2000, Jakarta: STIA LAN Press.
- Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, . 2000, Jakarta: Bumi Aksara.
- Santosa, Panji, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. . 2008, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi, *Manajemen Pelayanan*, 2008, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, . 2007, LAKSBANG.
- Lukman, Samparaa, *Manajemen Kualitas Pelayanan* . 2000, Jakarta: STIA LAN Press.
- Tamin, Feisal, *Reformasi Birokrasi*, . 2004, Jakarta: Blantika.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi & Politik di Indonesia* , 2004, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro *Reformasi Administrasi Publik* , 2004, Jakarta: MIAUNKRIS.
- Ubaidillah, A. dan Rozaq, Abdul, *Demokras, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, . 2007., Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Widodo, Joko, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, . 2007, Malang: CV Citra.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.